



ISSN 1693-0231



INDONESIA



PERTAHANAN SEMESTA YANG ENJAMIN KELANGSUNGAN HII

JAKARTA, 22-23 JANUARI 2020



Nuansa Baru Di Balik Rapim Kemhan,
TNI dan POLRI Tahun 2020

JENDERAL URIP SUMOHARJO



Serambi Redaksi

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat :

Menteri Pertahanan
Letjend TNI (Purn)
H. Prabowo Subianto

Sekjen Kemhan
Laksda TNI
Dr. Agus Setiadji, S.AP, M.A

Pemimpin Umum :

Karo Humas Setjen Kemhan
Brigjen TNI
Totok Sugiharto, S. Sos.

Pemimpin Redaksi :

Kabag Infopublikata Biro Humas
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi :

M. Adi Wibowo, M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis :

Imam Rosyadi
Mandiri Triadi, S.Sos.
Fadilah Ferdian

Foto :

Fotografer Biro Humas
Saifulloh

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, M.M.

Para pembaca yang budiman,

Di awal Tahun 2020 Tim Redaksi Wira Kemhan kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi bulan Januari-Februari 2020 Nomor 1 dengan tampilan konten artikel dan berita yang berbeda serta menarik.

Pada kesempatan edisi awal ini tim redaksi akan mengetengahkan laporan utama "Nuansa Baru Di Balik Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020", dan beberapa artikel, diantaranya : "Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020", Peningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Australia Melalui Pertemuan 2+2 ke-6 pada Tahun 2019; Konsepsi Dual Use Kekuatan TNI dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Alam; serta berita-berita tentang Kemhan.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi



EDISI JANUARI-FEBRUARI 2020

Nomor 1

Diterbitkan oleh:
Biro Humas Setjen Kemhan
Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Daftar Isi

4

EDISI JANUARI_FEBRUARI 2020
NOMOR 1

ARTIKEL

NUANSA BARU DI BALIK RAPIM KEMHAN, TNI DAN POLRI TAHUN 2020

5

Maka menjadi tak heran jika Rapim tahun ini diberi nama, Rapim Kemhan, TNI dan POLRI, karena adanya dua Institusi sebagai garda terdepan untuk menjaga serta memperkokoh keamanan dan kedaulatan NKRI yang turut hadir dalam Forum Rapim Tahunan tersebut. Dari beberapa fenomena menarik itu, patut kita berikan apresiasi dan dukungan, karena hal ini menunjukkan sinergi dan kekompakkan yang saling mendukung dan saling mengisi diantara Kemhan, TNI dan POLRI didalam satu forum besar Rapim Tahun 2020.



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020

14

PENINGKATKAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI PERTEMUAN 2+2 KE-6 PADA TAHUN 2019

17

KONSEPSI DUAL USE KEKUATAN TNI DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

22

BERITA PERTAHANAN

KUNKER MENHAN RI KE PERANCIS, TANDAI 70 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK RI – PERANCIS

29

KEMHAN GODOK REGULASI TURUNAN UU PSDN UNTUK PERTAHANAN NEGARA

30

SEKJEN KEMHAN MENGHADIRI ACARA RAPAT PIMPINAN TNI TAHUN 2020

31

RAPIM UO KEMHAN TAHUN 2020 : MEMBANGUN SDM YANG PROFESIONAL DAN BERSEMANGAT BELA NEGARA

32

WAMENHAN HADIRI DEFEXPO 2020 DI INDIA

33

Nuansa Baru Di Balik Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020

Oleh:

Muhammad. Adi. Wibowo, M.Si

Kasubbag Penerbitan dan Promosi Bag Infopublikata
Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah yang dipersiapkan secara dini dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) melalui usaha pengelolaan sumber daya nasional yang meliputi segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan pertahanan dalam menanggulangi ancaman.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Kementerian Pertahanan sebagai pengembang fungsi pemerintahan di bidang pertahanan berupaya mencapai sasaran kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan, sesuai dengan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris, tetapi mengarah kepada Indonesia sentris.

Visi dan misi Presiden di bidang pertahanan dituangkan dalam bentuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden, yang selanjutnya dijabarkan oleh Menteri Pertahanan dalam bentuk Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam Kebijakan Pertahanan Negara tahunan dan kebijakan-kebijakan bidang pertahanan lainnya. (Bab I Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020).

Seiring dengan berjalannya waktu dalam proses pelaksanaan kebijakan bidang pertahanan negara di setiap tahunnya, Kementerian Pertahanan terus berupaya keras mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka mengawal jalannya penyelenggaraan pertahanan negara secara trasparan, profesional dan akuntabel.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Memasuki tahun 2020 ini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid 2, Kementerian Pertahanan yang di warnai dengan wajah kepemimpinan baru akan sekuat tenaga untuk memulai mengimplementasikan dan merealisasikan kebijakan-kebijakan strategis pertahanan negara yang terangkum didalam produk Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) Tahun 2020-2024 dan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020.

Untuk mengawali momen yang sangat penting tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020. Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020 yang mengambil tema "Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI" di gelar dari tanggal 22 sampai dengan 23 Januari 2020 bertempat di Kantor Kemhan, Jakarta.

Untuk diketahui bahwa Rapim yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada setiap tahunnya merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya. Selain itu forum Rapim juga bertujuan untuk menyamakan visi, misi, persepsi serta penyampaian direktif Menteri Pertahanan guna ditindaklanjuti oleh para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kemhan demi keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara pada tahun anggaran berjalan.

Disamping itu Forum Rapim Kemhan, TNI dan POLRI pada Tahun 2020 menjadi forum penyampaian kebijakan-kebijakan pimpinan dan pembahasan berbagai permasalahan pada tahun anggaran sebelumnya ataupun prediksi yang akan timbul dalam rangka mengeliminasi kendala

dan hambatan pada pelaksanaan program dan anggaran sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. (Buku panduan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020).

Namun dibalik perhelatan Rapim tersebut, ternyata terdapat beberapa hal menarik dan nuansa baru yang sangat berbeda dari penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya untuk kali pertama Rapim Kemhan, TNI dan POLRI ini dilaksanakan dibawah kepemimpinan Menteri Pertahanan H. Prabowo Subianto. Yakni, seorang mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopasus TNI AD yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada bulan Oktober 2019 lalu. Selain itu, adanya kehadiran dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, di tengah-tengah forum Rapim, yang mana setelah beberapa tahun kebelakang Rapim tahunan yang diadakan di Kementerian Pertahanan belum sempat mendapat kehadiran dari seorang Presiden RI.

Yang paling terlihat lagi perbedaannya adalah saat kehadiran Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis. Bukan hanya pucuk pimpinannya saja yang hadir, namun jajaran dikedua institusi mulai pejabat pangkat Jenderal berbintang satu hingga Jenderal berbintang tiga ikut mendampingi keberadaan Panglima TNI dan Kapolri selama Rapim berlangsung.

Maka menjadi tak heran jika Rapim tahun ini diberi nama, Rapim Kemhan, TNI dan POLRI, karena adanya dua Institusi sebagai garda terdepan untuk menjaga serta memperkokoh keamanan dan kedaulatan NKRI yang turut hadir dalam Forum Rapim

Tahunan tersebut. Dari beberapa fenomena menarik itu, patut kita berikan apresiasi dan dukungan, karena hal ini menunjukkan sinergi dan kekompakkan yang saling mendukung dan saling mengisi diantara Kemhan, TNI dan POLRI didalam satu forum besar Rapim Tahun 2020.

Semarak kegiatan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020 selain di hadiri oleh para Kepala Staf Angkatan, juga mendapat perhatian dari beberapa Menteri yang ada di jajaran Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga. Beberapa pejabat tersebut menyempatkan waktu untuk menghadiri Forum Rapim terhormat itu. Salah satu dari mereka yakni, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Ketua BPK RI Agus Firman Sampurna dan Kepala BIN Budi Gunawan. Tidak hanya hadir, namun para pejabat Menteri dan Setingkat Menteri tersebut turut memberikan pembekalan kepada para peserta Rapim.

Bersamaan dengan rangkaian kegiatan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020, juga dilaksanakan penyerahan naskah Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020 dan Amanat Anggaran Tahun 2020 oleh Menteri Pertahanan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan, yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020.

Pembukaan Rapim, Wamenhan Bahas Perkembangan Industri Pertahanan

Hari pertama Rapim Kemhan,

TNI dan POLRI Tahun 2020, Rabu (22/01) secara langsung dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono. Saat membuka Rapim, Wamenhan membahas soal perkembangan industri Pertahanan Dalam Negeri.

Wamenhan mengatakan Kemhan selalu berupaya untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan menunjang kemandirian Industri Pertahanan. Sebagai pejabat baru dilingkungan Kementerian Pertahanan, Wamenhan beranggapan kebijakan ini tentunya sudah pas untuk diambil, karena searah dan sejalan dengan Visi Bapak Presiden RI terkait dengan kebijakan pembangunan teknologi dan industri pertahanan. (kemhan.go.id_2020).

Selain itu, Wamenhan menegaskan, pengembangan Industri Pertahanan dalam negeri berpeluang diarahkan untuk mendukung kebutuhan postur pertahanan Nirmiliter. Apabila semua kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan, maka selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan sipil.

Disamping menyoroti bidang Industri Pertahanan, Wamenhan secara umum juga menyampaikan pentingnya dan strategisnya kegiatan Rapim Kemhan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2019 serta menelaah proyeksi keberhasilan program kerja Tahun Anggaran 2020.



Sambutan Pembukaan Rapim Kemhan 2020 Bapak Sakti Wahyu Trenggono Wakil Menteri Pertahanan RI



Menurut Wamenhan, Rapim Kemhan kali ini merupakan rapim pertama pada periode pemerintahan saat ini. Selain itu point penting lainnya adalah bahwa program kerja yang disusun harus sinergi dengan tujuan strategis yang tercantum dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, bahwa tahun 2020 merupakan tahun krusial ditinjau dari aspek strategi dan kebijakan pertahanan negara. Karena pada tahun 2020 akan berlangsung penyusunan berbagai kebijakan dan produk strategis bidang pertahanan negara, mengingat tahun ini adalah awal tahun masa pemerintahan periode lima tahunan.

Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono dihadapan para peserta Rapim menyampaikan peran penting dari langkah koordinasi dan sinergitas antar satuan kerja, antar U.O. dan antar Kementerian/Lembaga yang harus tetap dilakukan secara intens. Menurutnya hal tersebut berguna untuk memastikan bahwa pertahanan negara selalu dalam kondisi terbaiknya sesuai dengan lingkungan startegis dan analisa ancaman.

Dalam kesempatan momen tersebut, Wamenhan juga mengutarakan beberapa atensi kepada para peserta Rapim, yang mana antara lain; Pertama, Tingkatkan kerja sama, kolaborasi, koordinasi dan sinergi guna memastikan terlaksananya Program Kerja Tahun Anggaran 2020 secara baik dan efektif. Kedua, Laksanakan evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kemhan. Dan ketiga, pertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kemhan dari BPK RI.

Disamping penyampaian sambutan Wamenhan, Rapim Kemhan Tahun 2020 di hari Pertama diisi dengan agenda pembahasan, evaluasi pelaksanaan program TA. 2019 dan rencana pelaksanaan beserta strategi pencapaian target Program TA. 2020 yang dipaparkan oleh para Kepala Satuan Kerja (Satker) U.O di lingkungan Kemhan.

Kehadiran Presiden Joko Widodo di Hari Ke-2 Rapim, Berikan Pengarahan

Dihari kedua Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020, Presiden Joko Widodo hadir untuk memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat. Dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan dasi, Presiden Jokowi Kamis (23/1) tiba di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, dan langsung disambut oleh Menhan Prabowo Subianto. Usai menerima penghormatan melalui Upacara Jajar Kehormatan, Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto menuju ruang acara.



Saat memberikan pengarahanannya Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemhan, TNI dan POLRI untuk bekerja sungguh – sungguh dan berdiri paling depan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jajaran Kemhan, TNI dan POLRI harus mampu mengatasi berbagai spektrum ancaman pertahanan negara, mulai dari konflik internal, ancaman perang asimetris, ancaman teror, perang proxy maupun ancaman perang hibrida. (kemhan.go.id._2020).

Presiden mengingatkan bahwa terdapat beberapa tantangan kedepan yang akan semakin berat untuk ditempuh. Tantangan besar pertama, yaitu semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara

dan memiliki kesiapan menggelar kekuatan bersenjata dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu menurut Presiden Joko Widodo jika Menteri Pertahanan sering melakukan kunjungan keluar negeri, itu dilakukan dalam rangka untuk diplomasi pertahanan, dan bukan untuk yang lain-lainnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan untuk tantangan besar kedua, adalah perkembangan luar biasa dari teknologi militer, yang perlu diantisipasi lompatan perkembangan teknologinya, baik dalam jangka 20, 30, hingga 50 tahun kedepan. Untuk itu, Indonesia harus terus melakukan upaya dalam memperkuat penguasaan teknologi pertahanan. "Diperlukan kebijakan perencanaan pengembangan Alutsista yang tepat, apakah pembelian ini berguna untuk 20, 30, 50 tahun kedepan, harus dihitung, harus dikalkulasi semuanya secara detail", jelas Presiden.

Selanjutnya Presiden Jokowi memberikan perhatiannya terkait tentang belanja pertahanan, yang mana menurutnya perlu kebijakan yang tepat. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan, agar industri strategis betul bergerak, kemandirian dalam membangun industri pertahanan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

harus serius dimulai. Untuk itu Presiden mengingatkan beberapa hal tentang industri Strategis, yang sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan, yakni, menjamin adanya *Transfer Of Technology* (ToT), kerjasama produksi dengan pihak BUMN, upaya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pengembangan rantai produksi antara pihak BUMN dengan Korporasi Swasta serta UKM.

Dengan demikian dapat dilihat dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI tahun 2020 Presiden Joko Widodo mendorong keseriusan jajaran industri pertahanan dalam negeri untuk membangun kemandirian dalam industri strategis. "Perlu saya informasikan bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Anggaran Rp127 triliun itu harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," (Unggah Presiden Joko Widodo di halaman Facebook miliknya, (Kamis, 23/01/2020).

Terap ada kemungkinan kerja sama pengembangan alutsista dengan negara lain, di mana Menteri Pertahanan telah menjajakinya, misalnya dengan Perancis, Korea Selatan, atau negara-negara Eropa Timur. Menurut Presiden Jokowi Itulah yang membawa Menteri Pertahanan pergi ke sebuah negara: selain tugas diplomasi pertahanan, juga untuk melihat alutsista yang akan dibeli. Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail.

Adapun perhatian lainnya dari Presiden Joko Widodo dalam pengaruhannya adalah menekankan bahwa Pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI. Kesejahteraan prajurit yang dimaksud mencakup kaitannya dengan perumahan, kesehatan dan tunjangan kinerja.

Sementara itu pada kesempatan forum yang sama, Menteri Pertahanan H. Prabowo Subianto dalam sambutannya mengajak semua pihak dan komponen bangsa Indonesia untuk turut serta dalam upaya mewujudkan pertahanan negara yang kuat melalui pembangunan Sistem Pertahanan Semesta. (kemhan.go.id_2020)

Diutarakannya bahwa sesuai dengan Tema yang diangkat pada Rapim, yakni "Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI" menunjukkan signal kepada semua komponen bangsa untuk turut serta dalam membangun dan mewujudkan pertahanan negara yang kuat.

Lebih lanjut disampaikan Menhan bahwa Sistem Pertahanan Semesta diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber daya nasional Indonesia, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya buatan dalam satu kesemestaan. "Hal ini diselenggarakan

secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI", jelas Menhan.

Dengan demikian menurut Menhan, seluruh rakyat Indonesia harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan.

Indhan Gelar Expo di Tengah Kegiatan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI 2020

Berbeda dengan pelaksanaan Rapim ditahun-tahun sebelumnya, bersamaan dengan kegiatan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020 ini, Industri Pertahanan (Indhan) dalam negeri juga ikut berpartisipasi menyelenggarakan Pameran (Expo) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Produk – produk (Alutsista) dalam negeri yang dihasilkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) ikut dipamerkan.

Salah satu contoh yang dipamerkan yakni, produk pesawat terbaru buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), kapal dibawah permukaan laut atau diatas permukaan laut produksi PT PAL Indonesia, serta kendaraan tempur



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



dan senjata dari PT Pindad. Selain itu berbagai prototipe seperti misil, alat komunikasi, prototipe kendaraan *Mobile Command Control Vehicle (MCCV)*, drone hingga pakaian prajurit juga di tampilkan oleh beberapa industri pertahanan dalam negeri swasta Nasional.

Yang cukup menarik perhatian para Peserta Rapim dan tamu undangan adalah prototipe pesawat tanpa awak atau Pesawat Udara Nirawak (PUNA) jenis *Medium Altitude Long Abdurance (MALE)* yang dipamerkan di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Depan Gedung Urip Sumoharjo Kemhan. Prototipe PUNA MALE merupakan pesawat tanpa awak hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri yang diinisiasi oleh Badan Litbang Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. (kemhan.go.id._2020).

Dalam pengembangan PUNA MALE tersebut, Kemhan bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara, BPPT, ITB, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri dan Lapan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pembentukan Konsorsium Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA).

Pameran alutsista yang diselenggarakan saat itu pun juga mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Usai memberikan pengarahan kepada peserta Rapim, Presiden RI yang didampingi Menhan selanjutnya meninjau pameran produk – produk Alutsista yang mana seluruhnya merupakan produk kebanggaan dari industri dalam negeri.***

Referensi :

- Buku Panduan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI tahun 2020.
- Naskah Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020.
- Naskah Sambutan Wamenhan saat Pembukaan Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020
- Naskah Sambutan Menhan pada Rapim Kemhan, TNI dan POLRI Tahun 2020

Website

- https://www.facebook.com/Jokowi/?_tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD3yuY8EK6ddFsqehhvZhzmieA13a-7vQYhmm0IngRMb8hzt3lYGuYCKnFYRoZhJYVYLLud6jc0d0TH6
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/22/wamenhan-membuka-rapim-kemhan-tahun-2020.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/23/presiden-ingatkan-jajaran-kemhan-tni-dan-POLRI-harus-mampu-atasi-spektrum-ancaman-dan-kuasai-teknologi-pertahanan.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/23/demi-kelangsungan-nkri-menhan-ajak-semua-komponen-bangsa-bangun-pertahanan-semesta-yang-kuat.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/23/industri-pertahanan-dalam-negeri-gelar-pameran-alutsista-pada-rapim-kemhan-tni-dan-POLRI-2020.html>

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020



Umum

Kebijakan pertahanan negara tahun 2020 merupakan penjabaran tahunan dari kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang bercirikan pada kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

Tujuan disusunnya kebijakan pertahanan negara ini untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui sasaran kebijakan.

Sasaran Kebijakan

a. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan Wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

- 1) Percepatan dalam mewujudkan *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* dan *Air Defence Identification System (ADIS)* di seluruh wilayah udara Indonesia melalui kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait.
- 2) Optimalisasi sarana dan prasarana berupa wahana pemantauan dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah pertahanan, terutama wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan menggunakan radar dan PTTA/drone untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
- 3) Perkuatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional sesuai dengan konsep sentralitas ASEAN, peningkatan kerjasama pertahanan dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung, negara di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan kawasan Pasifik Selatan serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia untuk kepentingan nasional. Penguatan kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional, khususnya di Laut Cina Selatan.
- 4) Peningkatan profesionalitas pasukan siaga yang didukung kelengkapan peralatan sesuai dengan kondisi, untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.
- 5) Penggerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk tugas pertolongan yang dapat diproyeksikan ke luar wilayah yurisdiksi NKRI untuk menjaga keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri dan membantu negara sahabat yang mendukung kepentingan nasional Indonesia.
- 6) Peningkatan pengiriman pasukan perdamaian dunia yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai sehingga

- mampu mengirim 1 Brigade pasukan perdamaian setiap tahun ke seluruh wilayah misi PBB, serta mewujudkan Indonesia sebagai sepuluh negara terbesar pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
- b. Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.
- 1) Sinkronisasi dan sinergitas dalam membangun sistem pembinaan kesadaran bela negara di antara Kementerian Pertahanan, Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, Polri, Pemda dan komponen bangsa lainnya, melalui kebijakan terpadu.
 - 2) Melanjutkan pembangunan postur TNI melalui pemenuhan kekuatan pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif. Pengembangan personel TNI menerapkan prinsip kebijakan *right sizing* dan *proportional growth* disesuaikan dengan pengembangan satuan TNI.
 - 3) Terwujudnya konsep pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi ibu kota baru, dengan memperhatikan kemungkinan ancaman dan kondisi geografis.
 - 4) Terbentuknya Satuan TNI Terintegrasi (STT) pulau-pulau terluar di Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak, dan Merauke yang dilengkapi penguatan sensor terintegrasi ke Puskodalops TNI dan Angkatan dengan membangun radar pantai dan *long range camera*.
 - 5) Penguatan wilayah pertahanan laut dengan meningkatkan kekuatan kapal-kapal perang TNI AL yang meliputi : Kapal Frigat, Kapal Korvet, Kapal Cepat Rudal, Kapal Patroli yang dipersenjatai dengan peluru kendali minimal jarak 150 km, dan Kapal Selam yang dipersenjatai dengan rudal dan torpedo, serta peningkatan kemampuan fasilitas pangkalan-pangkalan.
 - 6) Penempatan rudal di selat-selat strategis yang merupakan *choke points* sesuai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III.
 - 7) Pembangunan sistem pertahanan udara nasional dengan meningkatkan kekuatan pesawat-pesawat tempur TNI AU dengan melengkapi rudal *Air to Air Missile (AAM)* berjarak jangkau lebih dari 100 km dan rudal *Air to Ground Missile (AGM)*, serta pembangunan peluru kendali darat ke udara untuk pertahanan ibu kota negara.
 - 8) Pembangunan kekuatan matra darat dilaksanakan melalui:
 - a) Penambahan batalyon tempur, baik infanteri, kavaleri, artileri medan, dan artileri pertahanan udara beserta unsur pendukungnya disesuaikan dengan luas wilayah NKRI dan sistem pertahanan pulau-pulau besar.
 - b) Revitalisasi persenjataan batalyon infanteri berupa pembaruan senjata perseorangan sehingga senjata lama dapat dipergunakan untuk komponen cadangan.
 - c) Rematerialisasi senjata kelompok terdiri dari senapan otomatis, Senapan Mesin Ringan (SMR), Senapan Mesin Sedang (SMS) maupun Senapan Mesin Berat (SMB), dan mortir termasuk pemenuhan bekal pokok Munisi Kaliber Kecil (MKK).
 - d) Penempatan peluru kendali pertahanan udara di Kepulauan Natuna, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa.
 - 9) Peningkatan kapabilitas teknologi siber yang mampu melindungi negara, dengan mengikuti pergantian bentuk baru peperangan.
 - 10) Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara yang diselenggarakan melalui fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; tata kelola, koordinasi, dan pertukaran informasi; analisis intelijen; modernisasi dan infrastruktur alat penunjang kerja; serta profesionalisme Sumber Daya Manusia.
 - 11) Penguatan Kogabwilhan I, II, III dan Koopssus TNI yang difokuskan mampu melakukan kendali efektif dan pendudukan efektif sebagai wujud kehadiran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 12) Penguatan latihan gabungan TNI untuk meningkatkan kemampuan *interoperability* dan terintegrasi yang didukung satu sistem *network centric warfare* dengan memanfaatkan teknologi satelit dalam rangka menghadapi perang modern.
 - 13) Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan sebagai berikut:

- a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- b) Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
- c) Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- d) Peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- e) Peraturan perundang-undangan yang merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional bidang pertahanan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bidang pertahanan, sesuai dengan Program Legislasi Pertahanan.
- 14) Penguatan pengawasan pengelolaan anggaran dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, bebas korupsi dan efisiensi melalui pola pendampingan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka mempertahankan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 15) Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kemhan dan TNI.
- c. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), untuk Pertahanan Negara.
- 1) Terwujudnya proyeksi kader Bela Negara sesuai dengan desain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
 - 2) Pembentukan 100 satuan setingkat batalyon Komponen Cadangan matra darat, laut, dan udara guna memperkuat Komponen Utama, dan peningkatan kualitas serta kuantitas komponen pendukung.
 - 3) Peningkatan daya guna industri pertahanan nasional dengan menindaklanjuti prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan untuk siap diproduksi dan mewujudkan komitmen Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk memprioritaskan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan, meliputi kekuatan komponen utama diperkuat dengan komponen cadangan sesuai dengan kematraan, dan komponen pendukung yang ditata sesuai dengan keahlian dan profesi.
- d. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan
- 1) Percepatan pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)* di atas wilayah Batam, Tanjung Pinang dan Natuna.
 - 2) Pembangunan depo-depo logistik pertahanan khususnya depo Munisi Kaliber Besar (MKB) dan Munisi Kaliber Kecil (MKK) yang terdesentralisasi di wilayah Kodam, Lantamal, dan Lanud tipe A sehingga diharapkan mampu menyiapkan bekal pokok sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Pembangunan wilayah pertahanan bertumpu pada pertahanan pulau besar secara mandiri dan selat strategis sesuai dengan kompartemen strategis dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Peningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Australia Melalui Pertemuan 2+2 ke-6 Pada Tahun 2019

Oleh :

Yuli Ari Sulistyanı

Alumni Universitas Pertahanan,

Fakultas Strategi Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1949, Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui hak kemerdekaan Indonesia (Lisbet, 2015). Secara geografis, posisi Indonesia dan Australia berdekatan sehingga sangat penting secara geopolitik bagi kedua negara untuk menjalin hubungan bilateral agar dapat menciptakan stabilitas di kawasan (Kementerian Pertahanan, 2015). Sejak awal terjalin hingga saat ini, perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Australia pun sangat dinamis. Pencapaian tertinggi hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan disepakatinya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia* pada 4 April 2005 (Pramitha, 2017)

Selanjutnya, pada tahun 2006, Indonesia dan Australia sepakat untuk memperkuat kerjasama keamanan yang tertuang dalam *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* atau yang lebih dikenal dengan Lombok Treaty. Kemudian pada tahun 2012, disepakati kerangka kerjasama yang mengatur kerjasama antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia yang meliputi beberapa ruang lingkup antara lain : pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan, serta peningkatan pemahaman antara masyarakat dan antarindividu (Kementerian Pertahanan, 2015).

Mengamati dinamika dan berbagai potensi ancaman di kawasan, kerjasama di bidang pertahanan dan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

keamanan menjadi salah satu prioritas kedua negara. Indonesia dan Australia mengimplementasikan kerjasama tersebut melalui berbagai kegiatan forum dialog seperti Indonesia-Australia *Defence Strategic Dialogue* (IADSD), Australia-Indonesia *High Level Committee* (Ausindo HLC), dan pertemuan 2+2 (Kementerian Pertahanan, 2015).

Dalam tulisan ini, kerjasama pertahanan yang menjadi fokus pembahasan adalah pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Australia. Pertemuan 2+2 adalah mekanisme dialog antara Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) dari kedua negara (Kementerian Luar Negeri, 2019). Indonesia dan Australia pertama kali menyetujui pembentukan pertemuan 2+2 pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia tahun 2010. Melalui forum ini, Menlu dan Menhan Indonesia dan Australia membahas berbagai isu strategis yang terkait dengan hubungan bilateral dan perkembangan regional.

Pertemuan 2+2 telah menjadi sebuah forum dialog sebagai sarana bertukar perspektif dan saling berbagi informasi mengenai isu-isu keamanan strategis yang berkaitan dengan kedua negara (Saragih, 2019). Selain itu, forum tersebut

juga menjadi wadah yang penting bagi kedua negara untuk membuka peluang kerjasama pertahanan yang lebih luas dalam rangka menghadapi tantangan keamanan bersama (Minister for Foreign Affairs Australia, 2019). Implementasi pertemuan 2+2 yang pertama dilaksanakan pada tahun 2012 dan menghasilkan pernyataan bersama yang berisi bahwa Indonesia dan Australia menikmati kemitraan yang bersahabat dan membangun (Gumay, Octavian, dan Swastanto, 2018).

Dalam perkembangannya, Indonesia dan Australia telah mengadakan pertemuan 2+2 sebanyak enam kali. Pertemuan 2+2 yang ke-6 digelar di Bali pada Desember 2019. Dalam pertemuan 2+2 tersebut, Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menhan Indonesia, Prabowo Subianto melakukan dialog dengan Menlu Australia, Marise Payne dan Menhan Australia, Linda Reynolds. Berbagai kerjasama yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain mengenai kerjasama maritim, pasukan penjaga perdamaian, kontra-terorisme, teknologi siber, serta penanggulangan dan mitigasi bencana (Redaksi Kumparan, 2019). Dua hal yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini yakni pembahasan mengenai peningkatan kerjasama keamanan maritim dan keterlibatan kedua negara dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia (pasukan penjaga perdamaian).

a. Kerjasama Keamanan Maritim

Sebagai negara yang berbatasan dengan laut, kejahatan transnasional seperti pembajakan, perompakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah maritim Indonesia-Australia menjadi tantangan bersama yang membutuhkan perhatian bagi



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

kedua negara. Ancaman maritim menjadi masalah klasik bagi Indonesia dan Australia dimana dalam beberapa kesempatan dialog dan forum internasional, kedua negara kerap membahas permasalahan tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 2018, Indonesia dan Australia sepakat untuk menandatangani perjanjian dimana terdapat sembilan prioritas yang menjadi fokus kerjasama. Beberapa prioritas yang terkait dengan keamanan maritim antara lain kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional yang terjadi di perairan Indo-Pasifik dan kerjasama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal (Mardiastuti, 2018).

Selanjutnya pada tahun 2019, prioritas serupa juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan 2+2 yang ke-6. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk bertukar informasi dan intelijen terutama pada domain maritim sebagai langkah bersama untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman maritim, khususnya illegal fishing dan kejahatan transnasional di perairan kedua negara (Radio Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, hal ini menjadi indikasi bahwa kedua negara memiliki komitmen tegas untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan.

b. Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Dalam pertemuan 2+2, Indonesia-Australia juga menyampaikan komitmen mereka untuk turut serta dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran dunia. Merujuk pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per Oktober 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-8 sebagai negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar (*United*

Nations, 2019). Fakta tersebut menunjukkan komitmen kuat dari Indonesia untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia yang diapresiasi oleh Australia karena reputasi baik yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, Menhan Australia, Linda Reynolds kemudian setuju untuk meningkatkan kerjasama pertahanan di bidang tersebut (Ariesta, 2019).

Indonesia dan Australia menginisiasi bentuk kerjasama baru di bidang *peacekeeping operation* PBB melalui konsep *co-deployment* yang artinya pembagian penyediaan fasilitas maupun pasukan perdamaian. Kedua negara membuat rencana yaitu pengiriman pasukan perdamaian berasal dari Indonesia, sedangkan alutsista seperti pesawat, helikopter akan disediakan oleh Australia (Radio Republik Indonesia, 2019).

Selain itu, fokus pembahasan lainnya adalah melakukan kerjasama dalam konteks perempuan, keamanan, dan perdamaian termasuk partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian (Radio Republik Indonesia, 2019). Kedua negara menyadari pentingnya peran pasukan perdamaian wanita dalam misi perdamaian dunia. Pasukan perdamaian wanita memiliki peran yang sama pentingnya dengan para pasukan perdamaian laki-laki, terutama untuk rekonstruksi pasca konflik. Bahkan, untuk beberapa tugas seperti pendekatan kepada para korban konflik



khususnya wanita dan anak-anak, peran pasukan perdamaian wanita sangat diperlukan untuk membantu memulihkan rasa trauma para korban perang atau konflik.

Analisa

Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga dan mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara memperkuat hubungan bilateralnya melalui perjanjian *Comprehensive Strategic Partnership* dan *Lombok Treaty*. Merujuk pada teori kerjasama internasional, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing dan kepentingan bersama. Di bawah payung kerjasama tersebut, Indonesia dan Australia saling berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan, memperkuat arsitektur keamanan regional, dan menjaga keamanan maritim melalui berbagai kerjasama yang dijalin (*Minister for Foreign Affairs Australia*, 2019).

Salah satu bentuk dari kerjasama internasional yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini adalah kerjasama pertahanan melalui pertemuan 2+2 yang diadakan pada bulan Desember 2019. Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menekankan kepentingan nasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat (Supriyatno, 2014). Tiga hal yang mendasari terjadinya kerjasama pertahanan antara lain penilaian ancaman, situasi negara, dan perkembangan teknologi persenjataan (Simamora, 2013).



Sumber foto : gatra.com

Jika menganalisis hasil pertemuan ancaman dan terjalin *mutual 2+2* yang salah satunya berfokus *trust* yang dapat membuat pada pertukaran informasi Indonesia dan Australia menjadi intelijen dalam sektor maritim, mitra strategis (Muthanna, 2011). maka kerjasama pertahanan Selain itu, konsep *co-deployment* antara Indonesia-Australia terjalin untuk misi perdamaian PBB atas dasar penilaian adanya tentunya sejalan dengan *common threat* di kawasan, seperti upaya pemenuhan kepentingan penangkapan ikan ilegal dan nasional dan komitmen Indonesia kejahatan transnasional lainnya, untuk meningkatkan partisipasi sehingga kerjasama pertahanan dan peran pasukan perdamaian dalam sektor maritim menjadi hal wanita dalam misi perdamaian yang penting untuk ditingkatkan PBB.

Kesimpulan

Sementara itu, konsep *co-deployment* dalam operasi Pertemuan 2+2 antara perdamaian PBB yang disepakati Indonesia dan Australia memiliki oleh Indonesia dan Australia nilai strategis dalam upaya dalam pertemuan 2+2 ke-6 peningkatan hubungan bilateral termasuk ke dalam bentuk diantara kedua negara di tengah kerjasama pertahanan yang dinamikanya. Fokus pembahasan didasari oleh dinamika pengiriman dalam bidang maritim melalui pasukan perdamaian dan sejalan pertukaran informasi intelijen dengan perkembangan teknologi serta kerjasama konsep pendukungnya. Selain kerjasama *co-deployment* dalam misi pertahanan, konsep *co-deployment* pemeliharaan perdamaian PBB yang dicanangkan oleh kedua menjadi upaya kedua negara negara merupakan bentuk dari untuk memenuhi kepentingan aktivitas diplomasi pertahanan yang nasional masing-masing dapat meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM). Merujuk Selanjutnya, pada konsep diplomasi pertahanan kerjasama pertahanan melalui Cottey dan Foster, CBM merupakan pertemuan 2+2 menjadi indikasi salah satu karakteristik diplomasi bahwa kedua negara telah pertahanan yang bertujuan untuk membangun mutual *trust* guna menjalin hubungan yang baik di menciptakan CBM.***

antara kedua negara sehingga Indonesia dan Australia tidak menilai satu sama lain sebagai

REFERENSI

- Ariesta, M. (2019, December 06). RI-Australia Sepakat Kerahkan Pasukan Penjaga Perdamaian. Retrieved 18 December 2019 from Medcom. id: <https://www.medcom.id/internasional/asia/aNrQMD2K-ri-australia-sepakat-kerahkan-pasukan-penjaga-perdamaian-bersama>
- Gumay, R.N.S., Octavian, A., dan Swastanto, Y. (2018). Implementasi Diplomasi Pertahanan: Sinergi Indonesia dengan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal di Perbatasan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8 No. 1, April 2018, pp. 121-145.
- Kementerian Luar Negeri. (2019, Desember 05). RI-Australia akan Selenggarakan The 6th Foreign and Defence Ministers' 2+2 Meeting di Bali, 6 December 2019. Retrieved 20 December 2019 from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/864/siaran_pers/ri-australia-akan-selenggarakan-the-6th-foreign-and-defence-ministers-22-meeting-di-bali-6-desember-2019
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Lisbet. (2015). *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran*. Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VII, No. 09/I/P3DI/Mei 2015, pp. 5-8.
- Mardiaستuti, A. (2018, March 16). *Ini 9 Poin Kerjasama Maritim Indonesia-Australia*. Retrieved 16 December 2019 from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>
- Minister for Foreign Affairs Australia. (2019, December 05). *Australia-Indonesia Foreign and Defence Ministers' meeting*. Retrieved 20 December 2019 from Minister for Foreign Affairs Australia: <https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-indonesia-foreign-and-defence-ministers-meeting>
- Muthanna, K. (2011). *Military Diplomacy. Journal of Defence Studies*, Vol. 5 No. 1, January 2011, pp. 1-15.
- Pramitha, D. A. (2017, Juni). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim*. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3.
- Redaksi Kumparan. (2019, December 6). *7 Hasil Pertemuan Menhan dan Menlu Indonesia-Australia*. Dipetik January 3, 2020, dari Kumparan News: <https://kumparan.com/kumparannews/7-hasil-pertemuan-menhan-dan-menlu-indonesia-australia-1sOKNlcjncC>
- Radio Republik Indonesia. (2019, December 06). *Pertemuan 2+2 Menlu dan Menhan RI-Australia Sepakati Kerjasama Sejumlah Bidang*. Retrieved 12 December 2019 from Radio Republik Indonesia: http://rri.co.id/post/berita/755699/nasional/pertemuan_22_menlu_dan_menhan_riaustralia_sepakati_kerja_sama_sejumlah_bidang.html
- Saragih, A. (2019, December 06). *Menhan RI dan Australia Bahas Kerjasama Pertahanan*. Retrieved 16 December 2019 from Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/menhan-ri-dan-australia-bahas-kerja-sama-pertahanan/>
- Simamora, P. (2013). *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyatno. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- United Nations. (2019, October 31). *Troopp and Police Contributors*. Retrieved 20 December 2019 from United Nations Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>

Konsepsi *Dual Use* Kekuatan TNI Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Alam

Oleh :

Kolonel Caj Charles Simamora, S.Sos, M.M, M.Eng
Analis Kebijakan Madya Bidang Media Biro Humas Setjen Kemhan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis tetapi sangat rentan terhadap bencana alam. Para ahli kebencanaan mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dapat dijadikan Laboratorium Bencana dikarenakan oleh jenis dan intensitas bencana yang sangat banyak dan variatif serta mematikan. Kondisi ini memang menjadi realitas yang harus dihadapi Indonesia disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang tepat berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar atau *Triple Junction Plates Convergence*, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Lempeng Pasific, dimana Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan Lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Lempeng Pasific berada di utara Papua dan Maluku Utara.

Daerah pertemuan tiga lempeng besar yang saling bertabrakan inilah yang mengakibatkan terjadinya akumulasi energi tabrakan hingga sampai suatu titik tertentu lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi dan akhirnya energi tersebut dilepaskan dalam bentuk gempa bumi yang magnitudonya besar dan kuat.

Selain itu Indonesia berada tepat dalam jalur Cincin Api Pasifik atau *The Pacific Ring of Fire*. Jalur ini juga sering disebut dengan istilah *The Circum-Pacific Belt* merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia yang membentang sepanjang 40.000 km dari Kawasan *Ring of Fire* ini membentang sepanjang 40 ribu kilometer mulai dari Pantai Barat Amerika Selatan, ke Amerika Utara, Kanada, semenanjung Kamtschatka, Jepang kemudian Indonesia, Selandia Baru dan berakhir di kepulauan Pasifik Selatan.

Rangkaian Jalur Cincin Api Pasifik di Indonesia (Topinka, USGS/CVO, 2001)





Sumber: reportaseinti.wordpress.com

Konsekuensi logis dari posisi dan kondisi geologis di atas menempatkan Indonesia dalam situasi yang dilematis dan menghadapi banyak kejadian bencana alam khususnya gempa bumi baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Menurut data dari DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia) BNPB, pada rentang waktu mulai tahun 2018 s.d Januari 2020, telah terjadi bencana alam (Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, banjir, Karhutla dll) sejumlah 4,012, dengan dampak korban meninggal dunia sejumlah 4,814, korban luka sejumlah 22,487 dan mengungsi/menderita/terdampak langsung sejumlah 10,239,533, sehingga dapat disimpulkan rata rata ada kejadian bencana alam 5 atau 6 kali setiap harinya yang terdeteksi secara resmi oleh BNPB.

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2018 yang besar dan menimbulkan banyak korban antara lain kejadian gempa bumi Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2018, kejadian gempa bumi yang memicu terjadinya tsunami dan likuifaksi di Donggala dan Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September

2018, kejadian tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam dan meluluhlantakkan daerah pesisir Banten dan Lampung pada tanggal 22 Desember 2018, beberapa kejadian banjir bandang di Sumut dan Papua serta Karhutla yang sangat menguras waktu, tenaga dan keuangan Negara dalam mengatasinya.

Kondisi Penanggulangan Bencana Alam Saat Ini

Belajar dari Gempa dan Tsunami Aceh NAD yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan rangkaian gempa bumi besar tahun 2005 di Nias dan Simeulue serta di Laut Banda yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang sangat luar biasa dan termasuk salah satu bencana alam dunia yang paling besar dan mengerikan sepanjang sejarah, maka untuk mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan bencana alam ke depan, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejak tahun 2018 inilah secara resmi dan legal terbentuk suatu badan nasional setingkat lembaga/kementerian yang mengurus masalah kebencanaan di Indonesia.

Sejak dibentuknya BNPB sampai saat ini, sudah banyak keberhasilan dan kiprahnya yang membawa dampak positif dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, namun



Sumber: maritimnews.com

belum optimal dalam upaya penanggulangan bencana alam secara holistik dan komprehensif. Kurangnya Kepedulian dan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga upaya penanggulangan bencana alam ini belum maksimal, seperti yang disampaikan Kepala BNPB dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, pada Sabtu, tanggal 14 September 2019 terkait peran pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla, "Kurang peduli, rata-rata para pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten atau kota di daerah"

Berbagai masalah menonjol yang menjadi kendala Pemerintah (BNPB) dalam penanggulangan bencana alam antara lain:

1. Koordinasi dan sinergitas yang belum efektif dan belum optimal antara pemerintah pusat/BNPB, Pemerintah Daerah/BPBD, masyarakat serta pihak-pihak terkait (K/L) dalam upaya penanggulangan bencana alam, salah satunya penyebabnya adalah belum terbentuknya lembaga BPBD yang mandiri di seluruh daerah dan belum optimalnya kepedulian para pejabat daerah terhadap upaya penanggulangan bencana alam. (Buletin APBN, Vol III, Edisi 18, Hal 7, September 2018).
2. Keterbatasan dukungan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung upaya penanggulangan bencana alam. (Buletin APBN, Vol III, Edisi 18, Hal 4, September 2018)
3. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana serta alat peralatan

yang digunakan dalam penanggulangan bencana alam. (<https://www.republika.co.id/dpd-minta-penanggulangan-bencana-dilakukan-secara-cepat>)

4. Keterbatasan SDM baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas yang dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana alam dihadapkan dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. (<https://nasional.republika.co.id/berita/sdm-manajemen-bencana-dinilai-masih-minim>)
5. Masyarakat secara umum belum memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran yang memadai mengenai situasi dan kondisi kerawanan wilayahnya dari kemungkinan terjadinya bencana alam. (<http://m.suarasurabaya.net/BNPB-Menilai-Kesadaran-Masyarakat-pada-Potensi-Bencana-Alam-Masih-Rendah>)
6. Belum memadainya data dan informasi yang valid terkait potensi dan kerawanan serta ancaman bencana alam di semua wilayah Indonesia. (<https://www.republika.co.id/dpd-minta-penanggulangan-bencana-dilakukan-secara-cepat>)

Dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan di atas, selain Pemerintah/BNPB selalu melibatkan institusi TNI dalam setiap upaya penanggulangan bencana terutama dalam konteks pelaksanaan tanggap darurat bencana. Dengan kekuatan, kemampuan dan distribusi gelar pasukan yang berada

di seluruh pelosok tanah air, sangat dominan dan vital dalam membantu Pemerintah/BNPB dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengatasi akibat bencana alam. Bahkan dalam beberapa kejadian bencana alam TNI yang dilandasi semangat dan kesadaran membantu dan melindungi keselamatan masyarakat selalu tampil dan bertindak sebagai yang terdepan dan seringkali bergerak yaitu bergerak secara mandiri tanpa permintaan bantuan dari Pemerintah/BNPB.

Kehadiran dan perlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam yang berskala katastropik, berdampak luas dan hancurnya infrastruktur publik sangat diperlukan dan seringkali menjadi opsi tunggal karena hanya TNI lah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bisa melakukan operasi tanggap darurat bencana dalam situasi dan kondisi tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, TNI juga menghadapi berbagai masalah dan kendala yang berakibat kurang optimalnya kegiatan tanggap darurat bencana alam yang dilaksanakan, khususnya dari aspek kesiapan kapasitas SDM dan alat peralatan yang dimiliki yang seringkali belum sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Upaya penanggulangan bencana alam memang tidak boleh dilaksanakan secara parsial dan sektoral, tetapi diperlukan adanya koordinasi, kerjasama dan sinergitas dari semua pihak terkait dengan penanggulangan bencana alam ini. Pada Rakornas PB yang dilaksanakan BNPB pada 3 Februari 2020, BNPB mengajak berbagai pihak yang tergabung dalam Penta-Helix, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi/pakar, masyarakat



dan media massa untuk sama-sama untuk mendiskusikan tantangan penanggulangan bencana di Indonesia.

Konsepsi Implementasi Dual Use Kekuatan TNI Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Alam

1. Landasan Hukum Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam.
 - a. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada 10 ayat 3 huruf c dinyatakan bahwa tugas TNI adalah berkewajiban melaksanakan OMSP yang salah satunya adalah bantuan pencarian dan pertolongan (*Search And Resque*), bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam.
 - b. UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan tentang tugas TNI sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu tugas OMSP yang menjadi tanggung jawab TNI sesuai pasal 7 ayat 2 huruf b angka 12 adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 - c. PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada Pasal 25 (1) dinyatakan bahwa pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, dan satu instansi/lembaga yang dimaksud adalah TNI.

Dari uraian landasan hukum di atas, secara legal dan operasional, sebetulnya pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam sudah jelas dan memungkinkan untuk digunakan serta digerakkan kapan saja berdasarkan kebijakan dan permintaan pemerintah.

2. Konsep Dual Use.

- a. Konsep *Dual Use* merupakan salah satu konsep yang saat ini dan ke depan akan semakin berkembang dan banyak diaplikasikan oleh negara dan korporat di dunia khususnya di institusi militer. Organisasi dan produksi untuk kebutuhan alat peralatan pertahanan (Alutsista Militer) sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan penggunaannya ke bidang lain yang sifatnya komersil dan keperluan sipil selain kegunaan utama dan asasinya sebagai alat perang termasuk untuk mendukung kegiatan *civic mission*. Kondisi ini didorong oleh pertimbangan efisiensi biaya produksi dan operasional serta semakin sedikitnya kegiatan dan operasi yang menggerakkan kekuatan militer, sehingga di banyak negara institusi militer semakin memiliki banyak waktu atau periode senggang sementara institusi militer ini memiliki kapasitas yang sebetulnya bisa diberdayagunakan di bidang lain (*Idle Capacity*), sementara biaya dan kebutuhan operasional militer akan terus berjalan dan meningkat tahun demi tahun. Oleh karena itu, kondisi *Idle Capacity* ini dapat diberdayakan untuk tugas-tugas lain termasuk untuk penanggulangan bencana alam.
- b. Salah satu negara yang sudah menerapkan konsep *dual use* militernya baik dari segi organisasi dan alat peralatan militernya untuk tujuan *civic mission* termasuk dalam penanggulangan bencana alam adalah Jepang. Pasukan bela diri Jepang (JDF/Japan Defence Force) adalah bagian integral dari JDR (Japan

Disaster Relief) yang dipersiapkan, dilatih dan diperlengkapi khusus dalam membantu JDR melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam baik di dalam maupun di luar negeri. Organisasi Kebencanaan di Jepang sudah terstruktur dan terlembaga secara sistematis dalam kementerian tersendiri dan berada dibawah kendali langsung oleh Perdana Menteri yang memberikan kewenangan dan keleluasaan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan semua operasional penanggulangan bencana

Sejarah kebencanaan Indonesia telah mencatat bagaimana peran dan kontribusi dominan TNI dalam upaya penanggulangan bencana alam. Walaupun dengan kesiapan yang kurang optimal dan tidak didukung oleh alat peralatan kebencanaan yang memadai, tetapi TNI selalu tampil terdepan dan tanpa ragu untuk membantu dan menyelematkan masyarakat dari dampak bencana alam yang terjadi. Semangat pengabdian, militansi dan kerelaan hati para Prajurit TNI demi keselamatan masyarakat yang terdampak bencana alam ini sebetulnya dapat jauh lebih efektif dan optimal apabila secara organisasi, SDM dan alat perlatannya didukung secara memadai.

a. Organisasi. Dalam organisasi TNI, ada beberapa

Gambar Evakuasi Korban Banjir oleh JDF di Jepang



alam baik dalam kegiatan Pra-Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Jepang telah membuktikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah nyata dan menyeluruh serta kesiapan semua pihak, maka mereka dapat menghadapi bencana alam dengan lebih baik dan dengan korban yang jauh lebih sedikit. Pada gempa dan tsunami Jepang tahun 2011, walaupun daerah dan jumlah penduduk yang terdampak langsung oleh bencana jauh lebih besar dari kejadian gempa dan tsunami Aceh 2004 tetapi korban dan dampak yang diderita Jepang jauh lebih kecil daripada Indonesia.

3. Implementasi Dual Use Kekuatan TNI

satuan yang secara tugas dan fungsi utamanya dapat diberdayakan untuk melaksanakan tugas dalam upaya penanggulangan bencana alam antara lain:

- 1) Pengembangan satuan Zeni Tempur dan Zeni Konstruksi. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kontribusi tugas dan fungsi Zeni dalam penanggulangan bencana alam khususnya pembangunan infrastruktur publik dan aksesibilitas ke lokasi bencana maka Organisasi Zeni perlu dikembangkan sebagai berikut:
 - a) Yonzipur Setiap Kodam, dan minimal 1 (satu) Denzipur tiap Provinsi yang di luar Makodam.
 - b) Pembentukan 3 (tiga) Menzikon yang ditempatkan masing-masing di bawah Divisi

- Kostrad dan mendukung SRC PB Nasional.
- 2) Pengembangan Satuan Kesehatan. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kontribusi tugas dan fungsi Kesehatan dalam penanggulangan bencana alam maka perlu dikembangkan minimal 3 (tiga) Batalyon Kesehatan yang ditempatkan masing-masing di bawah Divisi Kostrad yang memiliki tugas melaksanakan operasi penanganan kesehatan korban akibat bencana alam.
 - 3) Pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana alam (SRC PB) setingkat satuan Kompi di setiap Kodam. Kompi SRC PB ini disusun secara komposit yang terdiri dari:
 - a) Satuan Setingkat Peleton (SST) Pelopor atau Perintis yang bertugas sebagai pembuka akses darurat baik jalur dari darat, laut dan udara, membangun infrastruktur awal jejaring komunikasi serta membantu pengamanan lokasi dan logistik.
 - b) Satuan Setingkat Peleton (SST) Kesehatan yang bertugas memberikan bantuan pertolongan pertama dan darurat bagi korban.
 - c) Satuan Setingkat Peleton (SST) Adminitrasi dan Logistik yang bertugas mendukung kebutuhan logistik dan administrasi awal dan darurat bagi korban bencana alam yang kategori rentan.
 - 4) Pengembangan SRC PB Nasional secara terpusat menjadi 3 (tiga) Wilayah yang meliputi wilayah barat, tengah dan timur (I,II dan III) yang diawaki oleh unsur-unsur angkatan dan disesuaikan dengan disposisi Divisi, Armada dan Koops AU yang dikoordinasikan oleh

- Pangkogabwilhan yang bertugas untuk melakukan operasi penanggulangan bencana yang minimal berskala Bencana Provinsi dan Nasional.
- 5) Pemberdayaan Satkowil yang berada di wilayah-wilayah yang memiliki resiko dan rawan bencana alam untuk melaksanakan kegiatan Pra Bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini, sehingga akan dapat meminimalisasi kemungkinan korban yang timbul apabila bencana alam terjadi.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang mengawaki satuan-satuan yang dikembangkan dan diberdayakan untuk *dual use* guna penanggulangan bencana alam ini, harus dipersiapkan, dididik, dilatih dan diperlengkapi dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian kebencanaan sehingga para Prajurit TNI ini akan dapat dan mampu melaksanakan tugas-tugas tambahannya dalam penanggulangan bencana alam.
 - 1) Bekerjasama dengan BNPB/BPBD atau K/L terkait untuk melakukan pendidikan, pelatihan, kursus (ToT, MoT), penataran, simulasi, semimar dan kegiatan lainnya untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.
 - 2) Bekerjasama dengan BUMN/BUMD dan korporat di pusat dan daerah untuk melaksanakan kegiatan terkait kebencanaan.
 - 3) Secara mandiri Lemdikpus TNI melaksanakan Diklat umum kebencanaan, sementara Lemdikrah TNI melaksanakan Diklat khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi kebencanaan di daerahnya.
 - 4) Perlu adanya kurikulum khusus kebencanaan dan buku pedoman kebencanaan sebagai bahan ajaran dan pegangan guru/pelatih dan peserta didik yang nantinya bisa digunakan di satuan masing-masing.
 - 5) Perlu adanya SOP (*Standard Operational Procedure*) kebencanaan yang disampaikan kepada semua Institusi dan SDM yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam.
 - 6) Melaksanakan latihan dan penataran mandiri di satuan-satuan yang ditunjuk menjadi kekuatan *Dual Use* TNI untuk penanggulangan bencana alam.
 - c. Alat Peralatan. Kelengkapan alat peralatan TNI yang sangat mungkin dapat digunakan dalam upaya penanggulangan bencana alam diluar fungsi utama dan asasnya harus dilengkapi dan diadakan secara

memadai. Faktor ketersediaan alat peralatan sangat menentukan efektifitas dari upaya penanggulangan bencana alam khususnya pada saat keadaan tanggap darurat bencana.

- 1) Pengadaan Alberzi (alat berat zeni) berbagai tipe atau jenis untuk satuan Zipur dan Zikon TNI.
- 2) Pengadaan alat peralatan untuk satuan kesehatan dan mendukung operasi kesehatan dalam penanggulangan bencana, antara lain:
 - a) Ambulans khusus, baik ambulans *offroad* di darat, kapal ambulans di laut dan heli atau pesawat ambulan di udara.
 - b) Peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit Darurat (Rumkitlap atau sejenis) yang mobil dan praktis penggunaannya.
- 3) Pengadaan Heli dan Pesawat Angkut yang serbaguna sehingga pada saat bencana alam terjadi maka dapat diberdayakan untuk melakukan penerjunan pasukan perintis, mengirim bantuan logistik dan personel, melakukan evakuasi pengungsi atau korban dan kegiatan bantuan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4) Pengadaan kapal laut angkut personel, kapal rumah sakit dan ambulans laut untuk mendukung setiap SRC PB Nasional yang dibentuk, yang memadai dan didukung oleh kapasitas, alat peralatan dan perlengkapan dukungan kesehatan yang memadai.
- 5) Pengadaan alat peralatan satuan dan perorangan yang sifatnya *portable* dan *compatible*, antara lain:
 - a) Perlengkapan khusus satuan dan perorangan yang disesuaikan dengan potensi kerawanan dan ancaman bencana alam di wilayahnya.
 - b) Pengadaan Dapurlap (dapur lapangan) dan kelengkapan hiburan dan psikologi.
 - c) Pengadaan alat komunikasi dan kelistrikan.
 - d) Pengadaan *water furifier*
 - e) Dan lain lain sesuai kebutuhan.

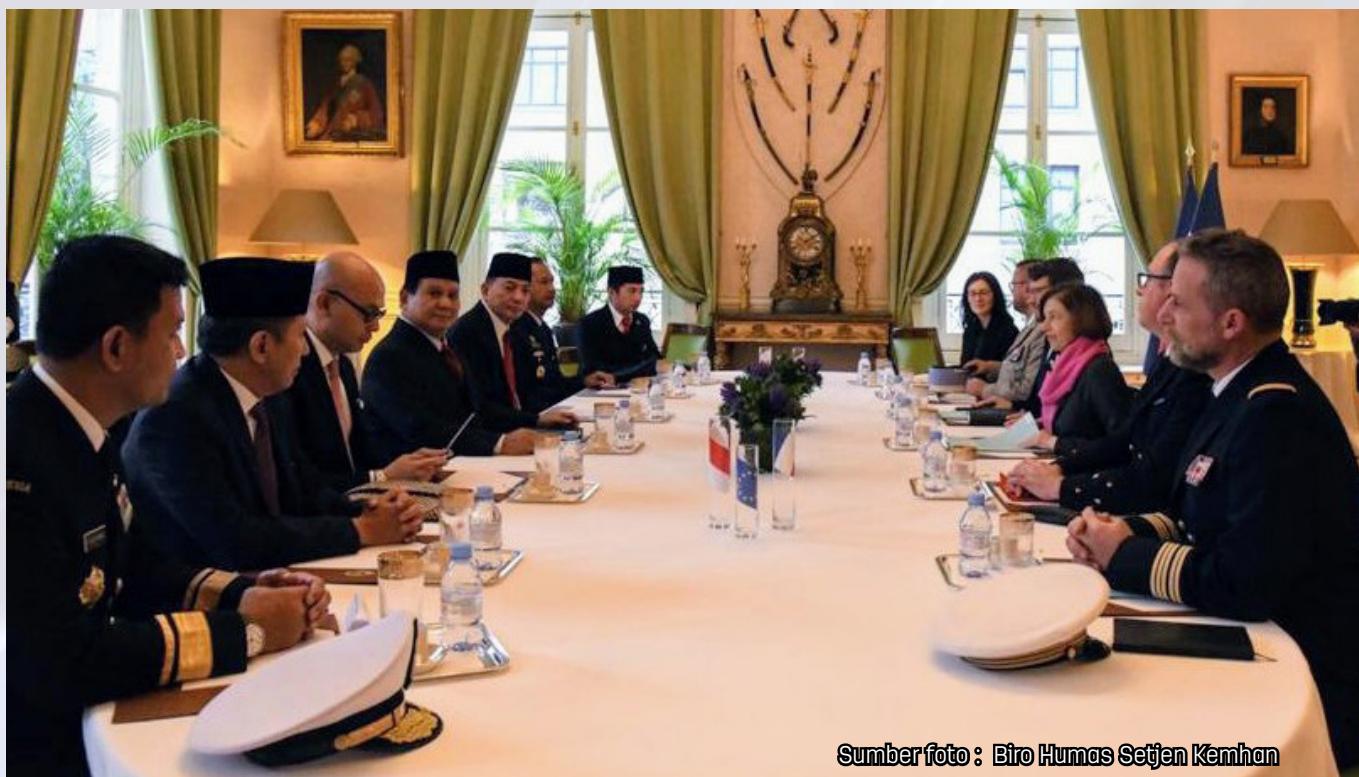
Penutup

Berdasarkan berbagai penelitian dan pendapat para ahli kebencanaan, ke depan, Indonesia akan menghadapi

berbagai bencana yang magnitudonya sangat besar dan mematikan, baik bencana yang sifatnya alamiah maupun bencana yang disebabkan oleh perbuatan dan kelakuan negatif manusia Indonesia sendiri. Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah sebagai *leading sector* kebencanaan dan seluruh pihak terkait untuk duduk bersama guna merumuskan upaya penanggulangan bencana alam yang holistik dan sinergis, termasuk bagaimana menempatkan posisi, peran dan tugas TNI dengan *idle capacity*nya secara tepat dan berhasil guna dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam serta mengurangi dampak resikonya.***

Referensi

- Buletin APBN, Vol III, Edisi 18, Hal 7, September 2018
- Buletin APBN, Vol III, Edisi 18, Hal 4, September 2018
- <https://www.republika.co.id/dpd-minta-penanggulangan-bencana-dilakukan-secara-cepat>
- <https://nasional.republika.co.id/berita/sdm-manajemen-bencana-dinilai-masih-minim>
- <http://m.suarasurabaya.net/BNPB-Menilai-Kesadaran-Masyarakat-pada-Potensi-Bencana-Alam-Masih-Rendah>
- <https://www.republika.co.id/dpd-minta-penanggulangan-bencana-dilakukan-secara-cepat>
- <https://kalteng.antaranews.com/korban-tewas-akibat-bencana-hujan-hebat-dijepang>



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kunker Menhan RI ke Perancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI – Perancis

DPeringatan hubungan diplomatik Indonesia dan Perancis yang telah terjalin selama 70 tahun ditandai dengan kunjungan tingkat tinggi pertama Menhan RI Prabowo Subianto ke Paris, Perancis.

Sebagai mitra strategis, hubungan kedua negara telah berjalan dengan baik dan membuka peluang besar untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Saat menginjakkan kaki di Kantor Kemhan Perancis, Senin (13/1), Menhan RI disambut dengan Upacara Penghormatan Militer oleh Menhan Perancis Florence Parly.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan membahas upaya untuk mempererat kerja sama pertahanan kedua negara diantaranya upaya untuk memperkuat sistem alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan nasional.

Sebagai upaya memperkuat kerjasama pertahanan dalam bidang

industri pertahanan, Menhan RI berkesempatan melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah perusahaan industri Perancis.

Kepada pelaku industri pertahanan Perancis, Menhan RI berharap akan terjalin kerjasama dalam mengekselerasi kemajuan industri pertahanan di Indonesia serta penguatan sistem alutsista TNI melalui transfer teknologi, peningkatan penggunaan kandungan lokal dan juga peningkatan kapasitas SDM.

Menhan RI juga berharap kedua negara dapat berkolaborasi untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kunci produksi global dalam produk alutsista.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kemhan Godok Regulasi Turunan UU PSDN untuk Pertahanan Negara

Undang – undang (UU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara yang disyahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (26/9/2019), saat ini sedang dalam tahap pembahasan untuk pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan sebagai *leading sector* saat ini sedang menggodok regulasi turunan UU PSDN untuk Pertahanan Negara tersebut.

Rapat Pleno Harmonisasi dalam rangka Pemantapan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/1) dipimpin langsung Dirjen Pothan Kemhan Prof. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.

Selain Kemhan turut hadir dalam Rapat Pleno Harmonisasi Pemantapan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 23



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara adalah kementerian/lembaga terkait.

Seperti tertuang dalam Pasal 4, UU PSDN untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida.

PSDN dilakukan melalui usaha Bela Negara, Penataan Komponen Pendukung (Komduk), Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), Penguatan Komponen Utama (Komput) serta mobilisasi dan demobilisasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 UU PSDN untuk Pertahanan Negara.

Sedangkan tujuan PSDN adalah mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sarana Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekjen Kemhan Menghadiri Acara Rapat Pimpinan TNI Tahun 2020



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, S.A.P, M.A menghadiri Acara Rapat Pimpinan TNI Tahun 2020 yang dibuka oleh Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, S.I.P, Rabu (29/1) di Gedung GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta.

Tema yang dipilih pada Rapim TNI 2020 adalah "Membangun TNI Yang Kuat, Unggul, Maju Dan Mandiri Guna Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok". Tema tersebut sangatlah tepat sejalan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman nyata yang sedemikian sulit diprediksi.

Pada acara ini hadir para Narasumber yaitu Menteri PPN/Bapenas, Menteri Keuangan dan Ketua BPK RI. Sedangkan evaluasi Program Kerja 2019 akan disampaikan oleh Kasum TNI dan Asrena Kas Angkatan.

Kegiatan Rapim ini akan dilaksanakan Olah Yudha sebagai tindak lanjut pengembangan Organisasi TNI yang telah dilaksanakan, antara lain Kogabwilhan, Koopsus TNI, Pusinfo Maritim TNI. Hal ini untuk memberikan kejelasan terkait dengan *grand design*, mekanisme kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sambil menunggu kelengkapan sarana dan prasarana serta alutsista organisasi yang baru.

Dengan telah dibentuknya organisasi baru tersebut dan berbagai pengembangan organisasi di tiap-tiap matra yang merupakan bagian dari pembangunan Postur TNI menjadikan tantangan bagi TNI untuk semakin mampu mengimplementasikan perannya sebagai komponen utama pertahanan negara, yang diikuti dengan pembangunan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke.

Berbagai organisasi baru yang telah dibentuk adalah sebagai upaya TNI untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan gelar operasi TNI diseluruh wilayah NKRI serta meningkatkan peran serta TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia***

Rapim UO Kemhan Tahun 2020 : Membangun SDM yang Profesional dan Bersemangat Bela Negara



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kementerian Pertahanan, Rabu (5/2), melaksanakan Rapat Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020 dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Laksdyo TNI Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A. di Aula Gedung AH Nasution lt. 16 Kantor Kemhan, Jakarta.

Tema yang diangkat dalam Rapim UO Kemhan Tahun Anggaran 2020, yaitu "Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Bersemangat Bela Negara, Guna Mendukung Pertahanan Semesta yang Kuat".

Sekjen Kemhan Laksdyo TNI Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A., membuka Rapim UO Kemhan Tahun 2020 dilanjutkan dengan evaluasi Program dan Anggaran UO Kemhan Tahun 2019 dan penyampaian Kebijakan Pimpinan Tahun 2020. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M, saat menjadi pembicara dalam Rapim UO Kemhan ini untuk memberikan atensi terhadap kinerja UO Kemhan Tahun 2019.

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kemhan Brigjen TNI Amad Sugiyono, S.E., M.M. memberikan paparan mengenai Program Kerja dan Anggaran UO Kemhan Tahun 2020.

Rapim UO Kemhan Tahun 2020 ini bertujuan untuk membangun sinergitas sumber daya manusia Pertahanan yang profesional dan memiliki budaya kerja tanpa korupsi dalam rangka mendukung tugas UO Kemhan.

Rapim UO Kemhan ini diikuti oleh segenap pejabat Eselon I, II, dan III Kemhan serta undangan yang berasal dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Dalam Rapim UO Kemhan ini juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis Perjanjian Kinerja Eselon I, II, III dan IV Kemhan.

Hadir pula sebagai pembicara Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R. Wiwin Istanti, S.E, Ak.M.Laws yang memaparkan mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, serta Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko, Ak.M.M., yang memberikan pemaparan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.***



Wamenhan Hadiri *DefExpo 2020* di India

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menghadiri salah satu pameran industri pertahanan terbesar di dunia, *DefExpo 2020* di Lucknow, India pada Rabu (5/2).

Wamenhan menghadiri pameran yang telah sebelas kali dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan India itu bersama Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Dody Trisunu, Kabaranahan Mayjen TNI Budi Prijono, Dirtekindhan Laksma TNI Sriyanto, dan sejumlah asisten khusus Wamenhan.

Wamenhan Trenggono bergabung bersama 35 menteri pertahanan dari berbagai negara atau pejabat setingkatnya kala Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pameran yang diikuti sekitar seribu perusahaan, dimana 165 perusahaan diantaranya dari luar India.

"Sangat strategis mengikuti kegiatan seperti *DefExpo 2020* ini. Pertama, kita bisa melihat perkembangan terbaru dari industri pertahanan global. Kedua, melakukan diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara yang potensi diajak kerjasama. Ketiga, mempromosikan industri pertahanan lokal ke global," papar Wamenhan Trenggono disela-sela kunjungan selama pameran tersebut.

Pada kesempatan itu Wamenhan juga mengaku mendapatkan ilmu banyak tentang bagaimana cara India merealisasikan ambisinya menjadi salah satu pusat manufaktur pertahanan internasional dengan mengajak perusahaan-perusahaan pertahanan dunia berinvestasi di negaranya.

"Lucknow ini ibukota dari Uttar Pradesh yang merupakan negara bagian India terbesar dari segi populasi dan berhasil menjadi kawasan industri pertahanan. Kuncinya harus ada kepastian order dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian/Lembaga Pemerintah yang lain, untuk memandirikan industri pertahanan nasional ke tingkat global," tutupnya.***







ISSN 1693-0231



ENGLISH



PERTAHANAN SEMESTA YANG ENJAMIN KELANGSUNGAN HII

JAKARTA, 22-23 JANUARI 2020



A New Nuances Behind
Indonesia MoD, TNI and POLRI
Leaders Meeting 2020

JENDERAL URIP SUMOHARJO



EDITORIAL

EDITORIAL BOARD

Advisors :

Minister of Defense
Lieutenant General (Ret)
H. Prabowo Subianto

Secretary General of MoD
Vice Admiral
Dr. Agus Setiadji, S.AP, M.A

Editor in Chief :

Head of Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Brig. Gen.
Totok Sugiharto, S.Sos .

Managing Editor :

Chief of Public Information and
Library of Public Relation Bureau of
The Secretariat General of MoD
Col. Hadi Prayitno

Editors :

M. Adi Wibowo, M.Si.
Captain Lindu Baliyanto.

Graphic Designer :

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.
Fadilah Ferdian

Photo :

Photografers
of Public Relations Bureau

Distribution Staff :

Nadia Maretti,M.M.

Dear kind readers,

We again greeted WIRA readers through this edition of January-February 2020 Number 1 with different and interesting articles and news content.

In addition in this edition the editorial team also presented the article about : A New Nuances Behind Indonesia MoD, TNI and POLRI Leaders Meeting 2020; State Defense Policy in 2020; Enhancing Indonesia-Australia Defense Cooperation through the 6th 2+2 Meeting in 2019; and Dual Use Conception of the Strength of the TNI In Support of the Natural Disaster Management and news of Ministry of Defense.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Editorial Team



EDITION OF JANUARY-FEBRUARY 2020

Number 1

Published by:
Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Jl. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Contents

ARTICLE

A NEW NUANCES BEHIND INDONESIA MOD, TNI AND POLRI LEADERS MEETING 2020



5

It is true that this year's Rapim is called, MoD, TNI and POLRI leaders meeting, since the two Institutions as the front guard to maintain and strengthen the security and sovereignty of the Republic of Indonesia attended the Annual Forum. From some of these interesting phenomena, we should give appreciation and support, because this shows the synergy and cohesiveness that mutually support and complement each other between the Ministry of Defense, the TNI and POLRI in one of the most important Leaders Meeting forums in 2020.

STATE DEFENSE POLICY IN 2020

14

ENHANCING INDONESIA-AUSTRALIA DEFENSE COOPERATION THROUGH THE 6TH 2 + 2 MEETING IN 2019

17

DUAL USE CONCEPTION OF THE STRENGTH OF THE TNI IN SUPPORT OF THE NATURAL DISASTER MANAGEMENT

22

DEFENSE NEWS

RI MINISTER OF DEFENSE WORKS VISIT TO FRANCE, MARKS 70 YEARS OF RI-FRANCE DIPLOMATIC RELATIONS

29

THE INDONESIAN MINISTER OF DEFENSE IS DRAFTING REGULATIONS OF LEGISLATION ON THE DERIVATIVE OF THE NATIONAL RESOURCE MANAGEMENT (PSDN) LAW FOR NATIONAL DEFENSE

30

THE SECRETARY GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE ATTENDED THE TNI LEADERS MEETING IN 2020

31

LEADERS MEETING OF MINISTRY OF DEFENSE 2020: CREATING PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES WHO HAVE THE STATE DEFENSE SPIRIT

32

DEPUTY MINISTER OF DEFENSE ATTENDED DEFEXPO 2020 IN INDIA

33

A New Nuances Behind Indonesia MoD, TNI and POLRI Leaders Meeting 2020

By:

Muhammad. Adi. Wibowo, M.Sc

Subhead Section of Publishing and Promotion Public Information and Public Relations Bureau Secretariat General of the Ministry of Defense



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

Indonesia's national defense is organized by the government which is prepared early in the People's Defense and Security System (*Sishankamrata*) through efforts to manage national resources which include all human resources, natural resources, artificial resources, as well as national facilities and infrastructure, throughout the region of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) as a defense unit in overcoming threats.

The management of the national defense system is one of the functions of government aimed at protecting national interests and supporting national policies in the field of defense. The Ministry of Defense, as the interim of government functions in the defense sector, seeks to achieve the stated objectives of the national defense policy, in accordance with the national development paradigm which is no longer Java centric, but leads to Indonesia centric.

The vision and mission of the President in the field of defense are outlined in the form of a National Policy on National Defense stipulated by the President, which is subsequently elaborated by the Minister of Defense in the form of a National Defense Policy. The policy is spelled out in the annual National Defense Policy and other defense policies. (Chapter I National Defense Policy 2020).

Along the time on in the process of implementing national defense policy every year, the Ministry of Defense continues to strive to develop and improve its performance in order to oversee the implementation of national defense in a transparent, professional and accountable manner.

Entering the year 2020, under the administration of President Joko Widodo volume 2, the Ministry of Defense which is tinged with a new leadership appearance will do everything in its power to start



implementing and realizing the national defense strategic policies summarized in the product of the National Defense General Policy (*Jakum Hanneg*) Year 2020-2024 and the National Defense Policy 2020.

To begin the very important moment, the Ministry of Defense (*Kemhan*) held a Leaders Meeting (*Rapim*) of the Ministry of Defense, the TNI and POLRI in 2020. The theme of the meeting is "Strong Universal Defense, Guaranteeing the Survival of the Republic of Indonesia" was started from the 22nd to the 23rd of January 2020 at the Ministry of Defense Office, Jakarta.

The Leaders Meeting (*Rapim*) at the Ministry of Defense is held annually as an evaluation of the implementation of the previous program of activities. In addition, the *Rapim* forum is also aims to equalize the vision, mission, perceptions and delivery of the Minister of Defense directive to be followed up by the Head of the Ministry of Defense Work Unit (*Kasatker*) for the successful implementation of the implementation of national defense in the current fiscal year.

Besides, Leaders Meeting Forum of the Ministry of Defense, TNI and POLRI in 2020 became a forum for the submission of leadership policies and discussion of various problems in the previous fiscal year or predictions that would arise in order to eliminate hindrance and obstacles in the implementation of programs and budgets so that the targets set could be achieved. (Guidance book for the Ministry of Defense Rapim, TNI and POLRI 2020).

However, behind the Rapim event, it turns out that there are

some interesting things and new nuances that are very different from the implementation in previous years. Since this is the first time that *Rapim Kemhan*, the TNI and POLRI were carried out under the leadership of Defense Minister H. Prabowo Subianto. H. Prabowo Subianto is known as a former Commander General (*Danjen*) Indonesian Army Special Forces (*Kopassus*) who was just inaugurated by President Joko Widodo as the Minister of Defense of the Republic of Indonesia in October 2019. In addition, the presence of the President of the Republic of Indonesia, Ir. H. Joko Widodo in the forum, which after a few years back the annual Rapim held at the Ministry of Defense had not yet had the chance to get a presence from any of Indonesian President.

The most noticeable difference is when the TNI Commander in Chief Air Marshall Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, S.I.P was present with the National Police Chief General Pol. Idham Azis. The top leaders as well as ranks of official starting from the rank of one-star General to three-star General of the two institutions were present in accompanying the existence of the TNI Commander and Chief of Police during the Meeting.

It is true that this year's Rapim is called, MoD, TNI and POLRI leaders meeting, since the two Institutions as the front guard to maintain and strengthen the security and sovereignty of the Republic of Indonesia attended the Annual Forum. From some of these interesting phenomena, we should give appreciation and support, because this shows the synergy and cohesiveness that mutually support and complement each other between the Ministry of Defense, the TNI and POLRI

in one of the most important Leaders Meeting forums in 2020.

The lively activities of the Ministry of Defense, TNI and POLRI Leaders Meeting in 2020 besides being attended by the Chiefs of Staff Forces, also received the attention of several Ministers in the ranks of the Advanced Indonesian Cabinet and the Head of the Institute. Some of these officials took the time to attend the honorable Rapim Forum.

One of them namely, Presidential Chief of Staff (KSP) Moeldoko, Coordinating Minister for Politics, law, and Security (*Menkopolhukam*) Mahfud MD, Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi, Minister of Finance Sri Mulyani, Minister of The Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia / National Development Planning Agency Suharso Monoarfa, Minister of Indonesia State Owned Enterprises (*BUMN*) Erick Thohir, Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform PAN-RB Tjahjo Kumolo, Chairman of Republic of Indonesia Supreme Audit Board Agus Firman Sampurna and Head of State Intelligence Agency BIN Budi Gunawan. These Ministerial and Ministerial level officials were not only present but also provided debriefing to the Rapim participants.

In conjunction with the series of activities of the Leaders Meeting Ministry of Defense, TNI and POLRI in 2020, the submission of the 2020 National Defense Policy and the 2020 Budget Statement by the Minister of Defense to the TNI Commander, Chief of Staff and Secretary General of the Ministry of Defense will be used as a guideline in organizing the country's defense year 2020.

Opening of Rapim, Deputy Minister of Defense Discuss the Development of Defense Industry

The first day of the Ministry of Defense, TNI and POLRI Leaders Meeting (Rapim) 2020, Wednesday (01/22) was directly inaugurated by Deputy Minister of Defense, Sakti Wahyu Trenggono. When opening the Rapim, the Deputy Minister discussed the development of the Domestic Defense industry.

The Deputy Minister of Defense said that the Ministry of Defense had always sought to develop the domestic defense industry in order to meet the needs of the TNI defense equipment and support the independence of the Defense Industry. As a new official within the Ministry of Defense, the Deputy Minister believes this policy is certainly appropriate to take, because it is in line with the Vision of the President of the Republic of Indonesia in accordance to the technology development and defense industry policies. (kemhan.go.id_2020).

Besides, the Deputy Minister emphasized that the development of the domestic Defense Industry could potentially be directed to support the needs of the non-military defense posture. If all of these needs can be met by the Defense Industry, then it can then be developed to support civilian needs.

Furthermore, highlighting the Defense Industry field, the Deputy Minister of Defense in general also conveyed the importance and



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

Sambutan Pembukaan Rapim Kemhan 2020 **Bapak Sakti Wahyu Trenggono** Wakil Menteri Pertahanan RI



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

strategic activities of the Ministry of Defense Rapim in evaluating the implementation of the 2019 Fiscal Year work program and examining the projected success of the Fiscal Year 2020 work program.

According to the Deputy Minister of Defense, the Ministry of Defense Rapim was the first rapim in the current administration period. In addition, another important point is that the work program that is prepared must be in synergy with the strategic objectives listed in the National Defense Policy (*Jakum Hanneg*) for 2020-2024.

The Deputy Minister further said that 2020 is a crucial year in terms of the strategy and policy of national defense. Because in 2020 there will be preparation of various policies and strategic products in the field of national defense, bearing in mind that this year is the beginning of the five-year term of government.

Deputy Minister of Sakti Wahyu Trenggono in front of the Rapim participants conveyed the important role of coordination and synergy steps between work units, between U.O. and between Ministries / Institutions that must be carried out intensively. According to him, it is useful to ensure that national defense is always in the best condition in accordance with the strategic environment and threat analysis.

On that occasion, the Deputy Minister also expressed some highlights to the Rapim participants, which among others; First, Increase cooperation, collaboration, coordination and synergy to ensure the implementation of the 2020 Fiscal Year Work Program properly and effectively. Second, carry out evaluations

and improvements throughout the Ministry of Defense work unit. And third, maintain the title of the Fair Opinion Without Exclusion (WTP) opinion for the Ministry of Defense from BPK RI.

In addition to the delivering speech of the Deputy Minister of Defense, the 2020 Ministry of Defense Rapim on the First Day was filled with a discussion agenda, an evaluation of the implementation of the 2019 Fiscal Year Work Program and implementation plan along with strategies for achieving the 2020 Fiscal Year Work Program targets presented by the Head of the Organizational Unit (*Satker*) in the Ministry of Defense.

The Presence of President Joko Widodo's on Rapim Day 2, Giving Direction

On the second day of the Ministry of Defense, TNI and POLRI 2020 Leaders Meeting, President Joko Widodo was present to give



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

direction to the participants of the Meeting. Wearing a black suit complete with a tie, President Jokowi arrived on Thursday (23/1) at the Bhinneka Tunggal Ika Kemhan Square, and was immediately welcomed by Defense Minister Prabowo Subianto. After receiving respect through a procession of Honorary ceremony, President Joko Widodo accompanied by Defense Minister Prabowo Subianto headed to the event space.

When giving his direction the President reminded the entire Ministry of Defense, the TNI and POLRI to work seriously and stand at the forefront in maintaining the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). The Ministry of Defense, the TNI and POLRI must be able to overcome various spectrums of national defense threats, ranging from internal conflicts, asymmetrical war threats, terror threats, proxy wars or hybrid war threats. (kemhan.go.id._2020).

The President reminded that there are challenges ahead that will be more difficult to take. The first major challenge is the increasingly widespread conflict spectrum in various parts of the world. Therefore, Indonesia must strengthen defense diplomacy to reduce tensions between countries and have readiness to deploy the armed forces in order to maintain the sovereignty of the territory of the Republic of Indonesia. Therefore, according to President Joko Widodo, if the Minister of Defense often visits abroad, it is completed in the context of defense diplomacy, and not for others.

Furthermore, the President said that for the second big challenge, is the extraordinary development of military technology, which needs to be anticipated to the leap in the technological development, both in the next 20, 30, to 50 years. For this reason, Indonesia must continue to make efforts to strengthen the mastery of defense technology. "An appropriate defense equipment development planning policy is needed, whether this purchase is useful for the next 20, 30, 50 years, must be calculated, everything must be calculated in detail," explained the President.

Furthermore, President Jokowi gave his attention regarding to the defense spending, which according to him, it needed



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

the right policy. Defense spending must be converted into defense investment, so that the strategic industry is truly moving, independence in developing the defense industry must be seriously started. For this reason, the President reminded several things about the Strategic industries, which are in accordance with the Defense Industry Law, which is guaranteeing the Transfer of Technology (ToT), production cooperation with the SOEs, efforts to increase the level of domestic content (TKDN) and the development of production chains between BUMN and Private and SME parties.

Thus, it can be seen in the 2020 of the Ministry of Defense, TNI, and POLRI Leaders Meeting President Joko Widodo encouraged the seriousness of the ranks of the domestic defense industry to build independence in strategic industries. "I need to inform you that the Ministry of Defense gets the largest allocation of the state budget since 2016 until now. The Rp127 trillion budget must be efficient, clean, no mark-ups anymore, and the most important thing is supporting our domestic industry," (President Joko Widodo uploaded on his Facebook page, (Thursday, 01/23/2020).

There is still the possibility of cooperation in the development of defense equipment with other countries, where the Minister of Defense has explored it, for example with France, South Korea, or Eastern European countries. According to President Jokowi that's what brought the Defense Minister to go to a country: in addition to the task of defense diplomacy, the visit is done to see defense equipment to be purchased whether it is good

or not good, original or not original, can be used or cannot be used, everything is checked in detail.

Another concern from President Joko Widodo in his briefing was to emphasize that the Government would continue to strive to improve the welfare of TNI soldiers and retirees. The welfare of the soldier in question includes relations to housing, health and performance benefits.

Meanwhile, on the same forum, Defense Minister H. Prabowo Subianto in his remarks invited all parties and components of the Indonesian nation to participate in efforts to realize a strong national defense through the development of the Universal Defense System. (kemhan.go.id_2020).

He stated that in accordance with the theme raised in the Rapim, as "Strong Universal Defense Guarantees the Survival of the Unitary Republic of Indonesia" showed a signal to all components of the nation to participate in building and realizing a strong national defense.

The Minister further explained that the Universal Defense System was implemented by utilizing Indonesia's national resources, like human resources, natural resources and artificial resources in a single universe. "This is

held in a total, integrated, directed, and continuing manner to ensure the survival of the Unitary Republic of Indonesia," explained the Minister of Defense.

Thus, according to the Minister of Defense, all Indonesian people must unite to continue to uphold the country's sovereignty, territorial integrity, and safety of all nations to face various threats and challenges in the future.

Indhan Holds Expo in the Midst of Activities of the Ministry of Defense Rapim, TNI and POLRI 2020

In contrast to the implementation of the *Rapim* in previous years, along with the activities of the Ministry of Defense *Rapim*, TNI and POLRI in 2020, the Defense Industry (*Indhan*) in the country also participated in organizing an exhibition (Expo) of the Main Weapon System (*Alutsista*). Domestic products produced by State-Owned Enterprises (BUMN) and Private-Owned Enterprises incorporated in the National Private Defense Industry Association (*Pinhantanas*) were also exhibited.

One example on display is the latest aircraft products made by PT Dirgantara Indonesia (DI),



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

ships below sea level or above sea level produced by PT PAL Indonesia, as well as combat vehicles and weapons from PT Pindad. Besides, various prototypes such as missiles, communication devices, prototypes of Mobile Command Control Vehicle (MCCV), drones to soldier clothes are also displayed by several national private domestic defense industries.

What attracted the attention of the Participants and invited guests of the Rapim was the prototype of unmanned aircraft or Nirawak Aircraft (PUNA) Medium Altitude Long Abdurance (MALE) exhibited at the *Bhinneka Tunggal Ika* Field, in front of the Urip Sumoharjo Kemhan Building. The PUNA MALE prototype is an unmanned aircraft resulting from domestic research and development initiated by the Ministry of Defense's R&D Agency in 2015. (kemhan.go.id/_2020).

In developing the MALE PUNA, the Ministry of Defense collaborated with Indonesian Air Force, BPPT, ITB, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industry and LAPAN through the signing of the Cooperation Agreement for the formation of the Unmanned Aircraft Consortium (PTTA).

The defense equipment exhibition that was held at that time also received attention from President Joko Widodo. After giving a briefing to the *Rapim* participants, the President of the Republic of Indonesia who was accompanied by the Minister of Defense next reviewed the exhibition of *Alutsista* products, all of which were proud products of the domestic industry.***

Reference :

- Ministry of Defense Rapim Handbook, TNI and POLRI 2020.
- 2020 National Defense Policy Paper.
- Text of the Deputy Minister of Defense during the Opening of the Ministry of Defense Rapim, TNI and POLRI 2020
- Text of Minister of Defense Speeches to the Ministry of Defense Rapim, TNI and POLRI 2020

The website :

- https://www.facebook.com/Jokowi/?_tn_=%2Cd%2CP-R&eid=ARD3yuY8EK6ddFsqehhvZhzmieA13a-7vQYhmm0IngRMb8hzt3lYGuYCKnFYRoZhJVVYld6
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/22/wamenhan-opening-rapim-kemhan-tahun-2020.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/23/presiden-ingat-jajaran-kemhan-tni-dan-POLRI-must-capable-comprehension-spectrum-threatment-and-control-technology-defense.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/23/demi-kel-Sustain-nkri-menhan-ajak-all-komponen-bangsa-bangun-Detention-semesta-yang-kuat.html>
- <https://www.kemhan.go.id/2020/01/23/industri-pertention-dalam-negeri-gelar-pExhibition-alutsista-pada-rapim-kemhan-tni-dan-POLRI-2020.html>

State Defense Policy In 2020



General

The national defense policy in 2020 is an annual elaboration of the national defense implementation policy, which is set every 5 (five) years.

General The national defense policy is carried out to manage all national resources and national infrastructure facilities to achieve the objectives of national defense in order to support national development. In preparing national defense policies based on the Universal People's Defense and Security System (*Sishankamrata*) which is characterized by popular, universal, and territorial.

The purpose of formulating this national defense policy is to be used as a guideline by relevant officials within the Ministry of Defense and the TNI in realizing the implementation of national defense in 2020. The national defense policy is flexible and adaptive which is realized through policy objectives.

Policy Objectives

- Maintaining the sovereignty and integrity of the Unitary Republic of Indonesia and protecting the safety of all nations from all forms of threats.
- Acceleration in realizing the Air Defense Identification Zone (ADIZ) and the Air

Defense Identification System (ADIS) in all Indonesian airspace through cooperation and coordination with related K/L.

- Optimizing facilities and infrastructure in the form of satellite-based remote monitoring and sensing vehicles in defense areas, especially border areas and outermost islands by using radar and PTTA/drones to obtain data and information in real time and connected to the control center as an effort increased early detection and early warning.
- Strengthening Indonesia's position as a regional power in accordance with the concept of ASEAN centrality, enhancing defense cooperation by prioritizing neighboring countries with direct borders, countries in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and South Pacific regions and countries that have defense cooperation with Indonesia to national interest. Strengthening maritime security cooperation through ongoing joint exercises in order to strengthen the regional security architecture, particularly in the South China Sea.
- Increasing the professionalism of the standby force supported by the completeness of the equipment in accordance with the conditions, for handling natural disasters, humanitarian assistance, and the task of world peace missions and other emergencies.
- The deployment and use of national defense forces for assistance tasks that can be projected outside the territory of the Republic of Indonesia to maintain the safety of Indonesian citizens abroad and help friendly countries that support Indonesia's national interests.
- Increasing the sending of professional world peacekeepers supported by adequate equipment and infrastructure so as to be able to send 1 peacekeeping Brigade every year to the entire UN mission area, as well as realizing Indonesia as the ten largest sending forces in the UN peacekeeping mission.

- b. Development of an integrated and modern People's Defense and Security System (*Sishankamrata*)
- 1) Synchronization and synergy in building a system of fostering awareness of national defense among the Ministry of Defense, Ministries/Institutions (K/L), TNI, Police, Regional Government and other national components, through an integrated policy.
 - 2) Continue the development of the TNI posture through the fulfillment of the main forces so that an effective deterrent force is formed. The development of TNI personnel applies the principles of right sizing and proportional growth policies in accordance with the development of TNI units.
 - 3) The realization of the concept of development and structuring of an integrated military defense system in the East Kalimantan region which will become the location of a new capital city, taking into account the possibility of threats and geographical conditions.
 - 4) Establishment of Integrated TNI (STT) outermost islands in Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak, and Merauke equipped with sensor reinforcement integrated into the TNI and Force *Puskodalops* by building coastal radars and long range cameras.
 - 5) Strengthening the sea defense area by increasing the strength of Navy warships which include: Frigate Ships, Corvette Ships, Fast Missile Ships, Patrol Ships armed with missiles at a minimum distance of 150 km, and Submarines armed with missiles and torpedoes, and improving the capabilities of base facilities.
 - 6) Placement of missiles in strategic straits which are choke points according to the Indonesian archipelago (ALKI) I, II and III sea lanes.
 - 7) Development of a national air defense system by increasing the strength of Indonesian Air Force fighter planes by completing air to air missile (AAM) missiles with a range of more than 100 km and air to ground missile (AGM) missiles, and building ground-to-air missiles for defense of the national capital.
 - 8) The development of the strength of the ground dimension is carried out through:
 - a) Add battalions, both infantry, cavalry, field artillery and air defense artillery along with their supporting elements adjusted to the territory of the Republic of Indonesia and the defense systems of large islands.
 - b) Revitalization of infantry battalion weaponry in the form of renewal of individual weapons so that old weapons can be used for reserve components.
 - c) Dematerialization of group weapons consisting of automatic rifles, light machine guns (SMR), medium machine guns (SMS) as well as heavy machine guns (SMB), and mortars including fulfillment of small-caliber munitions (MKK).
 - d) Placement of air defense missiles in the Natuna Islands, Kalimantan Island, Sumatra Island, Java Island.
 - 9) Increased capability of cyber technology that is able to protect the country, by following the changing of new forms of warfare.
 - 10) Strengthening the capacity of intelligence agencies for national defense, which is carried out through the functions of investigation, security and rising; governance, coordination and information exchange; intelligence analysis; modernization and work supporting infrastructure; and professionalism of human resources.
 - 11) Strengthening Kogabwilhan I, II, III and TNI Koopssus, which, are focused, are able to exercise effective control and effective occupation as a form of presence in the entire territory of the Republic of Indonesia.
 - 12) Strengthening joint military exercises to improve interoperability and integrated capabilities supported by a network centric warfare system by utilizing satellite technology in the context of facing modern warfare.
 - 13) Accelerate the formulation of defense legislation as follows:
 - a) Draft Law on Amendments to Law Number 34 Year 2004 concerning the Indonesian National Army.
 - b) Draft Law on Management of National Airspace.

- c) Draft Law concerning amendments to Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry.
 - d) Legislation mandated by Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense.
 - e) Legislation that is a ratification of international treaties on defense which is included in the open cumulative list of Ratification of International Treaties on defense, in accordance with the Defense Legislation Program.
- 14) Strengthening the oversight of budget management by applying the principles of accountability, transparency, free of corruption and efficiency through a pattern of assistance, supervision, and inspection in order to maintain a fair assessment opinion without exceptions (WTP).
- 15) Increasing the application of the Internal Control System (SPI), strengthening Bureaucracy Reform, and accelerating the realization of the Integrity Zone (ZI) towards Corruption-Free Areas (WBK) within the Ministry of Defense and the TNI.
- c. The realization of National Resource Management (PSDN), for National Defense.
- 1) Realization of State Defense cadre projections in accordance with the master design of Defending State Defending Awareness (PKBN).
 - 2) Establishment of 100 units of battalion level components of land, sea and air reserve dimensions to strengthen the Main Components, and increase the quality and quantity of supporting components.
 - 3) Increasing the efficiency of the national defense industry by following up the selected research results prototype to be ready for production and realizing the commitment of the Ministry of Defense and the Indonesian National Army to prioritize the use of domestic defense industry products.
 - 4) Improving the quality of defense human resources, including the strength of the main components reinforced with reserve components in accordance with the dimensions, and supporting components arranged according to expertise and profession.
- d. The implementation of defense area management
 - 1) Accelerate the acquisition of Flight Information Region (FIR) over Batam, Tanjung Pinang and Natuna.
 - 2) Development of defense logistics depots, especially large caliber munitions (MKB) and small caliber munitions (MKK), which are decentralized in Kodam, Lantamal, and Lanud type A areas so that they are expected to be able to prepare basic provisions as needed.
 - 3) Development of defense areas relies on the defense of large islands independently and strategic straits in accordance with the strategic compartment and the National Strategic Area (KSN).***

Enhancing Indonesia-Australia Defense Cooperation Through The 6th 2 + 2 Meeting in 2019

By :

Yuli Ari Sulistyani

*AAAlumni of Indonesia Defense University,
Department of Diplomacy Study, Faculty of Defense Strategy*

Indonesia and Australia have established their bilateral relations since Indonesia's independence struggle era. Since 1949, Australia was one of the first countries that recognize Indonesia's independence rights (Lisbet, 2015). Geographically, the position of Indonesia and Australia are neighboring countries, so that geopolitically it is very important for the both countries to build bilateral relations in order to maintain the stability in the region (Kementerian Pertahanan, 2015). Since the beginning of intertwined until now, the development of bilateral relations between Indonesia and Australia has been very dynamic. The highest achievement of diplomatic relation between the two countries was marked by the Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia on 4 April 2005 (Pramitha, 2017).

Furthermore, in 2006, Indonesia and Australia agreed to strengthen the security cooperation set out in the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation or well known as Lombok Treaty. Then in 2012, a cooperation framework was agreed to regulate the cooperation between Indonesia Defense Ministry and Australian Defense Ministry which covers several scopes including: defense, law enforcement, combating terrorism, intelligence, maritime, aviation safety and security, preventing the proliferation of weapons of mass destruction, disaster relief, international organizations related to security issues, and increased understanding between communities and individuals (Kementerian Pertahanan, 2015).

Observing the dynamics and various potential threats in the region, cooperation in defense and security sector is one of priorities of both countries. Indonesia and Australia have implemented the collaboration through various



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

activities such as dialogue forums namely the Indonesia-Australia Defense Strategic Dialogue (IADSD), the Australia-Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC), and 2+2 meeting (*Kementerian Pertahanan*, 2015).

Meanwhile, this paper would like to focus on the discussion of 2+2 meeting between Indonesia and Australia. The 2+2 meeting is a dialogue mechanism between foreign ministers and defense ministers from the two countries (*Kementerian Luar Negeri*, 2019). Indonesia and Australia first agreed to establish the 2+2 meeting during President Susilo Bambang Yudhoyono's state visit to Australia in 2010. Through this forum, the Foreign Ministers and Defense Ministers of Indonesia and Australia discussed various strategic issues related to bilateral relations and regional development.

The 2+2 meeting has been a dialogue forum as a means of exchanging each other perspectives and information related to strategic security issues related to both countries (Saragih, 2019). In addition, the forum has been an important forum for both countries to open up opportunities for broader defense cooperation in order to face common security challenges and threats (Minister for Foreign Affairs Australia, 2019). The implementation of the first 2+2 meeting was held in 2012 and a joint statement was

resulted containing that Indonesia and Australia enjoy the friendly and constructive partnership (Gumay, Octavian, and Swastanto, 2018).

In its development, Indonesia and Australia have conducted 2+2 meetings for six times. The 6th 2+2 meeting was held in Bali in December 2019. At the 2+2 meeting, Indonesian Foreign Minister, Retno Marsudi and Indonesian Defense Minister, Prabowo Subianto held a dialogue with Australian Foreign Minister, Marise Payne and Australian Defense Minister, Linda Reynolds. Various collaborations discussed at the meeting including maritime cooperation, peacekeepers, counter-terrorism, cyber technology, as well as disaster mitigation (Redaksi Kumparan, 2019). Two things are the focus of the discussion in this paper, such as the discussion in increasing maritime security cooperation and the involvement of both countries in the UN peacekeeping operation.

a. Maritime Security Cooperation

As a country bordered by the sea, transnational crimes such as piracy, hijacking, human trafficking, drug smuggling, and illegal fishing in Indonesia-Australia maritime area are the common challenges that require attention for both countries. The threats in maritime are the classic problems for Indonesia and Australia, where in several occasions like international dialogue and forums, the two countries often discuss these issues. For example in 2018, Indonesia and Australia agreed to sign an agreement which has nine priorities as the focus of the cooperation. Some priorities related to maritime security include cooperation to eradicate transnational crimes that occur in the Indo-Pacific region and cooperation to eradicate illegal fishing (Mardiastuti, 2018).



Furthermore, in 2019, similar priorities were also as the concern at the 6th 2+2 meeting. During the meeting, the two countries agreed to do information and intelligence exchanges, especially in the maritime domain as a joint effort to overcome various maritime challenges and threats, particularly the illegal fishing and other transnational crimes in the maritime area of both countries (*Radio Republik Indonesia*, 2019). Thus, it is an indication that both countries have a firm commitment to maintain stability of the maritime security in the region.

b. The United Nations Peacekeeping Operation

At the 2+2 meeting, Indonesia and Australia also expressed their commitment to actively participate in maintaining the world peace, security and prosperity. Referring to the United Nations (UN) data as of October 2019, Indonesia is ranked 8th as the largest-contributing-troop country in the UN peacekeeping operation (United Nations, 2019). This fact shows Indonesia's strong commitment to actively participate in maintaining the world peace which is appreciated by Australia because of Indonesia's good reputation. Therefore, Australian Defense Minister, Linda Reynolds agreed to enhance defence cooperation in the UN peacekeeping sector (Ariesta, 2019).

Indonesia and Australia initiated a new form of cooperation in the UN peacekeeping operation sector through co-deployment concept, which means there will be distribution in providing both facilities and the UN troops. Both countries have made plan, namely Indonesia will take part in providing the UN troops meanwhile Australia will provide the supported military equipment such as aircraft and helicopters (*Radio Republik Indonesia*, 2019).

In addition, the other focus of the discussion is conducting cooperation in the context of women, security and peace, including women's participation in the UN peacekeeping operation (*Radio Republik Indonesia*, 2019). Both countries recognize the importance of women peacekeepers roles in the UN peacekeeping operation. Women peacekeepers have an equal important role as men peacekeepers, especially for post-conflict reconstruction. Moreover, for certain tasks such as approaching the victims of the conflict, especially women and children, women peacekeepers' presence is needed to help the war/conflict victims restoring their trauma caused by the war.

Analysis

Indonesia and Australia are neighboring countries and strategic partners in the Indo-Pacific region. Both countries strengthen their bilateral relations through the Comprehensive Strategic Partnership agreement and Lombok Treaty. According to the theory of international cooperation, the cooperation conducted by Indonesia and Australia is an effort to fulfill each other national and their shared interests. By conducting the cooperation, Indonesia and Australia are mutually committed to promoting peace and security in the region, strengthening regional security architecture, and maintaining the maritime security, through various collaborations (Minister for Foreign Affairs Australia, 2019).





One form of international cooperations which has been focus discussion in this paper is defense cooperation through 2+2 meeting held in December 2019. Defense cooperation is a defense cooperation concept in the UN peacekeeping mission agreed by Indonesia and Australia at the 6st 2+2 meeting.

In addition, co-deployment and its' commitment in the UN peacekeeping operation namely peacekeeping numbers and the roles of women 2+2 meeting is also included in the form of peacekeepers. Defense cooperation which emphasizes cooperation is conducted by the national interests related looking at the dynamics of the state sovereignty, security, peacekeeping troops deployment stability, and people's prosperity and is in line with the development (Supriyatno, 2014). Three things of the supported technology underlie the establishment of the defense cooperation concept initiated by both countries include threat assessment, situation, and development of the defense diplomacy activities which weapons technology (Simamora, 2013). Analyzing the result of Building Confidence Measures (CBM). Referring to the 2+2 meeting, one of the results of defense diplomacy defined by Cottey and Foster, CBM is one of information exchange in maritime defense diplomacy characteristics sector. It can be concluded that aims to establish a good relation defense cooperation conducted between two countries so that by Indonesia and Australia Indonesia and Australia will not established based on shared perception each other as a threat and assessment of the existence of there will be mutual trust between the common threat in the region, Indonesia and Australia that such as illegal fishing and other transnational crimes, so that makes them becoming strategic partners (Muthanna, 2011). Moreover, defense cooperation in maritime sector has been a significant co-deployment concept in the UN peacekeeping operation is thing to be enhanced by both certainly in line with the efforts to fulfill Indonesia's national interest

Conclusion

The 2+2 meeting between Indonesia and Australia has strategic values as an effort to enhance bilateral relations amid its dynamics. Focus discussion in maritime sector through intelligence information exchange and co-deployment concept in the UN peacekeeping mission have been instruments for both countries to achieve their respective national interests through the concept of defense cooperation. Moreover, enhancing defence cooperation through 2+2 meeting has been an indication that both countries have built the mutual trust to create CBM.***

REFERENSI

- Ariesta, M. (2019, December 06). RI-Australia Sepakat Kerahkan Pasukan Penjaga Perdamaian. Retrieved 18 December 2019 from Medcom. id: <https://www.medcom.id/internasional/asia/aNrQMD2K-ri-australia-sepakat-kerahkan-pasukan-penjaga-perdamaian-bersama>
- Gumay, R.N.S., Octavian, A., dan Swastanto, Y. (2018). Implementasi Diplomasi Pertahanan: Sinergi Indonesia dengan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal di Perbatasan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8 No. 1, April 2018, pp. 121-145.
- Kementerian Luar Negeri. (2019, Desember 05). RI-Australia akan Selenggarakan The 6th Foreign and Defence Ministers' 2+2 Meeting di Bali, 6 December 2019. Retrieved 20 December 2019 from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/864/siaran_pers/ri-australia-akan-selenggarakan-the-6th-foreign-and-defence-ministers-22-meeting-di-bali-6-desember-2019
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Lisbet. (2015). *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran*. Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VII, No. 09/I/P3DI/Mei 2015, pp. 5-8.
- Mardiaستuti, A. (2018, March 16). *Ini 9 Poin Kerjasama Maritim Indonesia-Australia*. Retrieved 16 December 2019 from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>
- Minister for Foreign Affairs Australia. (2019, December 05). *Australia-Indonesia Foreign and Defence Ministers' meeting*. Retrieved 20 December 2019 from Minister for Foreign Affairs Australia: <https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-indonesia-foreign-and-defence-ministers-meeting>
- Muthanna, K. (2011). *Military Diplomacy. Journal of Defence Studies*, Vol. 5 No. 1, January 2011, pp. 1-15.
- Pramitha, D. A. (2017, Juni). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim*. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3.
- Redaksi Kumparan. (2019, December 6). *7 Hasil Pertemuan Menhan dan Menlu Indonesia-Australia*. Dipetik January 3, 2020, dari Kumparan News: <https://kumparan.com/kumparannews/7-hasil-pertemuan-menhan-dan-menlu-indonesia-australia-1sOKNlcjncC>
- Radio Republik Indonesia. (2019, December 06). *Pertemuan 2+2 Menlu dan Menhan RI-Australia Sepakati Kerjasama Sejumlah Bidang*. Retrieved 12 December 2019 from Radio Republik Indonesia: http://rri.co.id/post/berita/755699/nasional/pertemuan_22_menlu_dan_menhan_riaustralia_sepakati_kerja_sama_sejumlah_bidang.html
- Saragih, A. (2019, December 06). *Menhan RI dan Australia Bahas Kerjasama Pertahanan*. Retrieved 16 December 2019 from Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/menhan-ri-dan-australia-bahas-kerja-sama-pertahanan/>
- Simamora, P. (2013). *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyatno. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- United Nations. (2019, October 31). *Troopp and Police Contributors*. Retrieved 20 December 2019 from United Nations Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>.

Dual Use Conception of the Strength of the TNI In Support of the Natural Disaster Management

By :

Colonel Caj Charles Charles Simamora, S. Sos, MM, M.Eng

Senior Policy Analyst in the Public Relations Bureau of the Secretariat of the Ministry of Defense

Introduction

Indonesia is a country that is geographically very strategic but very vulnerable to natural disasters. The disaster experts say that Indonesia is one country that can be used as the Laboratory of Disaster caused by the type and intensity of disasters are many and varied and deadly. This condition has become a reality that must be faced by Indonesia due to the geographical position of Indonesia that the right to be at the meeting of three major tectonic plates or Triple Junction Plates Convergence, namely the Indo-Australian Plate, Eurasia and Pacific Plate, where the Indo-Australian Plate collides with the Eurasian Plate off the coast of Sumatra, Java and Nusa Tenggara, while the Pacific Plate is north of Papua and North Maluku. Regional meeting of three major plates that copy g collided this is resulting in the case of its accumulated energy collisions up to

a point in a certain layer of the Earth is no longer able to hold heaps of energy and that energy finally released right in the form of an earthquake whose magnitude is big and strong.

Beside that Indonesia was right in the path of the Pacific Ring of Fire or The Pacific Ring of Fire. This path is also often referred to as The Circum-Pacific Belt, which is a series of active volcanic volcanoes in the world that stretches along 40,000 km from the Ring of Fire Region, stretching for 40 thousand kilometers starting from the West Coast of South America, to North America, Canada, Kamtschatka peninsula, Japan then Indonesia, New Zealand and ending in the South Pacific islands.

The logical consequence of the above geological position and conditions places Indonesia in a dilemmatic situation and faces many natural

Pacific Ring of Fire in Indonesia (Topinka, USGS/CVO, 2001)



Source: Penulis



Source: reportaseinti.wordpress.com

disasters, especially earthquakes, both tectonic and volcanic earthquakes. According to data from DIBI (Data Disaster Information Indonesia) BNPB, on timescales since 2018 until January 2020, there have been natural disasters (earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, droughts, floods, Karhutla etc.) number 4.012, with the impact of the victims died the world number 4.814, the victim injured a number of 22.487 and displaced/suffer/directly affected a number 10,239,533, so that it can be concluded there is an average of natural disasters 5 or 6 times per day are detected officially by BNPB.

Several natural disasters that occurred during 2018 were large and caused many casualties including the Lombok earthquake on July 29, 2018 and August 5, 2018, the earthquake that triggered a tsunami and liquefaction in Donggala and Palu, Central Sulawesi on September 28 2018, the tsunami that was caused by the eruption of Anak Krakatau in the Sunda Strait hit and devastated the coastal areas of Banten and Lampung on December 22, 2018, several flash floods in North Sumatra and Papua and

Karhutla which drained the time, energy and state finances in overcoming them.

Current Conditions for Disaster Management

Learning from the Aceh NAD Earthquake and Tsunami that occurred on December 26, 2004 and the series of major earthquakes in 2005 on Nias and Simeulue and in the Banda Sea that caused tremendous loss of life and loss and were among the world's biggest and most natural disasters terrible throughout history, so to anticipate and overcome the possibility of natural disasters going forward, the government and the House of Representatives have established Law RI No. 24 of 2007 concerning Natural Disaster Management and followed up with Presidential Regulation No. 8 of 2008 concerning the establishment of the National Disaster Management Agency (BNPB). Since 2018 it is officially and legally formed a national body at the level of an institution/ministry that deals with disaster issues in Indonesia.

Since the establishment of BNPB until now, been a lot of success and his actions that have a positive impact in the prevention of natural disasters in Indonesia, but not optimal in the response to natural disasters in a holistic and co MPR ehensif. Lack of awareness and participation of local governments and communities so that the response to natural disasters is not maximized, as submitted BNPB



Source: maritimnews.com

in a press conference at the BNPB, Jakarta East, on Saturday, 14 September 2019 related to the role of local government in the handling Karhutla, "Less care, the average officials or leaders of the district or city level in the area".

There are various prominent problems which become the obstacle of the Government (BNPB) in natural disaster management including :

1. The coordination and synergy are not yet effective and have not been optimally established between the central government/BNPB, Local Government/BPBDs, communities and stakeholders (K/L) in the response to natural disasters, one of which the cause is not yet formed BPBD independent in all regions and the suboptimal concern of regional officials regarding natural disaster management efforts. (APBN Bulletin, Vol III, Issue 18, Page 7, September 2018).
2. The limited budget both at central and regional levels to support natural disaster relief efforts. (APBN Bulletin, Vol III, Issue 18, Page 4, September 2018)
3. Limited availability of facilities and infrastructure as well as equipment used in natural disaster management. (<https://www.republika.co.id/dpd-requests-disaster-disaster-to-be-done-quickly>)
4. The limitations of human resources both in terms of quantity and quality involved in efforts to deal with natural disasters are faced with a very high level

of disaster risk. (<https://nasional.republika.co.id/berita/sdm-management-bencana-inilai-masih-minim>)

5. The general public does not have knowledge and understanding and awareness are adequate on the situation and conditions of vulnerability territory of the likelihood of natural disasters. (<http://m.suarasurabaya.net/BNPB-Menilai-Kesadaran-Masyarakat-pada-Potensi-Bencana-Alam-Masih-Rendah>)
6. Insufficient valid data and information related to the potential and vulnerability and threat of natural disasters in all regions of Indonesia. (<https://www.republika.co.id/dpd-requests-disaster-disaster-to-be-done-quickly>).

In overcoming various obstacles and limitations above, so far the Government/BNPB always involve TNI institutions in every disaster management effort, especially in the context of implementing disaster response. With the strength, ability and distribution of the title of troops in all corners of the country, it is very dominant and vital in assisting the Government / BNPB in carrying out its duties to overcome the effects of natural disasters. Even in some natural disasters, the TNI which is based on the spirit and awareness of helping and protecting the safety of the community always appears and acts as a leader and often moves, that is, moves independently without requesting assistance from the Government/BNPB.

The presence and involvement of the military in the response to natural disasters -scale catastrophe, broad impact and destruction of public infrastructure indispensable and often the sole option because only the military was the one who has the capacity and capability that can perform emergency response operations under such circumstances.

However, in its implementation, the TNI also faces various problems and constraints that result in less than optimal natural disaster emergency response activities carried out, particularly in terms of the readiness of the capacity of human resources and equipment that are often not in accordance with the real needs in the field.

Natural disaster relief efforts it should not be implemented piecemeal and sectoral, but needed coordination, cooperation and synergy of all the parties concerned with combating this natural disaster. In the PB National Coordination Meeting conducted by BNPB on 3 February 2020, BNPB invited various parties who are members of Penta-Helix, namely the government, business world, academics / experts, community and mass media to jointly discuss the challenges of disaster management in Indonesia.

Implementation of the Conception of Dual Use of TNI Strength in Supporting Natural Disaster Management

1. Legal Basis for TNI Involvement in Natural Disaster Management
 - a. Law No. 3/2002 concerning National Defense, in 10 paragraph 3 letter c states that the duty of the TNI is the obligation to implement



Sumber: www.harnas.co

OMSP, one of which is search and rescue assistance, refugee assistance, and relief of victims of natural disasters.

- b. Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, in article 7 paragraph 1 which states the duties of the TNI as a state instrument that has the main duty to uphold state sovereignty, maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as protecting the entire nation and all of Indonesia's spilled blood from threats and disruption to the integrity of the nation and state. One of the tasks of the OMSP which is the responsibility of the TNI according to article 7 paragraphs 2 letter b number 12 is to help cope with the effects of natural disasters, displacement, and the provision of humanitarian assistance.
- c. PP No. 21 of 2008 concerning the Implementation of Disaster Management, Article 25 (1) states that during a state of disaster emergency, the Head of the BNPB and the Head of the BPBD are authorized to mobilize human resources, equipment, and logistics from agencies/institutions and the public to respond emergency, and one agency/institution in question is the TNI.

From the description of the legal basis, legally and operationally, the actual involvement of the TNI in dealing with natural disaster is clear and allows it to be used and mobilized at any time based on government policies and requests.

2. Dual Use Concept

- a. The concept of Dual Use is one of the concepts currently and in the future will be increasingly developed and widely applied by countries and corporations in the world, especially in military institutions. Organization

and production for the needs of defense equipment (military defense equipment) have begun to consider the possibility of their use in other fields of a commercial nature and civilian needs in addition to the main uses and their usefulness as a means of war, including supporting civic mission activities. This condition is driven by considerations of cost efficiency of production and operations as well as fewer activities and operations of the military force, so that in many countries the institution of military increasingly has a lot of time or a period of leisure while the military institution's own capacity that actually can be empowered in other areas (Idle Capacity), while military operational costs and needs will continue to run and increase year after year. Therefore, this condition of Idle Capacity can be empowered for other tasks including for natural disaster management.

- b. One of the countries that have implemented the concept of dual military use both in terms of organization and military equipment for the purpose of civic mission including natural disaster management is Japan. Japan Self-Defense Forces (JDF/Japan Defense Force) is an integral part of the JDF

(Japan Disaster Relief) was prepared, trained and equipped especially to help JDR in implementing natural disaster relief operations both inside and outside the country. Disaster Organization in Japan has systematically structured and institutionalized in the ministry of its own and is under the direct control by the Prime Minister gives authority and flexibility in policy-making related to all natural disaster relief operations both in the activities of Pre-Disaster, Emergency Response and Post-Disaster. Japan has proven that, policies

optimal and is not supported by adequate disaster relief equipment, the TNI always appears to be at the forefront and without hesitation to help and save the community from the impact of natural disasters that occur. The spirit of devotion, militancy and the willingness of the hearts of the TNI Soldiers for the safety of the people affected by natural disasters can actually be far more effective and optimal if organizationally, human resources and equipment are adequately supported.

- Organization. Within the TNI organization, there are several units whose main tasks and functions can be empowered to carry out their tasks in efforts to deal with natural disasters, including:

Picture of Evacuation of Flood Victims by JDF in Japan



and concrete and comprehensive steps and readiness of all parties can make them face natural disasters better and with far fewer victims. At the earthquake and Tsunami Japan in 2011, although the area and the number of people directly affected by the disaster is much larger than the earthquake and tsunami in 2004, but the victim and the impact suffered by Japan is much smaller than Indonesia.

3. Implementation of Dual Use of TNI Strength

The history of disasters in Indonesia has recorded the dominant role and contribution of the TNI in efforts to deal with natural disasters. Even though the readiness is not

- 1) Development of Combat Engineering and Construction Engineers. In order to optimize the role and contribution of the tasks and functions of the Engineer in overcoming natural disasters especially the development of public infrastructure and accessibility to disaster locations, the Engineer Organization needs to be developed as follows:
 - a) Yonzipur for every Kodam, and at least 1 (one) Denzipur for every province outside Makodam.
 - b) Formation of 3 (three) Menzikon which are placed respectively under the Kostrad Division and supports the National SRC PB .
- 2) Development of Health Unit. In order to optimize the role and contribution of tasks and functions

- of Health in natural disaster management, it is necessary to develop at least 3 (three) Health Battalions that are placed respectively under the Kostrad Division, which has the task of carrying out operations to handle the health of victims of natural disasters.
- 3) Establishment of natural disaster rapid response units (SRC PB) at the level of Company units in each Kodam. The SRC PB Company was compiled in a composite manner consisting of :
- a) Platoon-Level Unit (SST) Pioneer or Pioneer who served as opening emergency access both lines from land, sea and air, building the initial infrastructure of the communication network and helping secure the location and logistics.
 - b) Platoon-level Unit (SST) Health in charge of providing first aid and emergency assistance for victims.
 - c) Platoon-Level Unit (SST) Administration and Logistics in charge of supporting the logistics and administrative needs of early and emergency for victims of natural disasters that are vulnerable categories.
- 4) Development of SRC PB National is centrally into three (3) Region which covers the western region, central region and east region (I, II and III) which is manned by elements of force and adapted to the disposition Division, Fleet and Koops AU coordinated by Pangkogabwilhan whose duty is to carry out disaster management operations that are at least provincial and national scale.
- 5) Empowerment Satkowil located in areas that are at risk and vulnerable to natural disasters to conduct the Pre disaster, Plan of which includes prevention, mitigation, preparedness, as well as early warning, so that will minimize the possibility of casualties arising if natural disasters occur.
- b. Human Resources (HR). HR manning one an-unit developed and empowered to dual use for mitigation of natural disasters, must be prepared, educated, trained and equipped with the knowledge, skills and expertise in disaster so that the TNI Soldier is going to be and able to perform the duties of enhancements in dealing with natural disasters.
- 1) Working with BNPB/BPBDs or K/L related to education, training, courses (ToT, MOT), upgrading, simulation, seminar and other activities to provide a stock of knowledge, skills and expertise.
 - 2) Collaborate with BUMN / BUMD and corporate at the central and regional levels to carry out disaster-related activities.
 - 3) Independently *Lemdkpus* TNI implements general disaster training, while *Lemdkrah* TNI implements specialized training that is tailored to the needs and potential of disaster in its area.
 - 4) There is a need for a special disaster curriculum and disaster manual book as teaching material and guidance for teachers/trainers and students which can later be used in their respective units.
 - 5) There is a need for a SOP (Standard Operational Procedure) for disaster that is delivered to all Institutions and Human Resources involved in natural disaster management.
 - 6) Carry out independent training and upgrading in designated units as the strength of the Dual Use of the TNI for natural disaster management.
- c Equipment Tools. The completeness of TNI equipment that is very likely to be used in efforts to deal with natural disasters outside its main function and principle must be adequately equipped and carried out. The availability of equipment greatly determines the effectiveness of natural disaster management efforts, especially during disaster response situations.
- 1) Procurement of *Alberzi* (heavy equipment engineers) various types or types of units for *Zipur* and *Zikon* TNI.
 - 2) Procurement of equipment for health units and supporting health operations in disaster management, including:

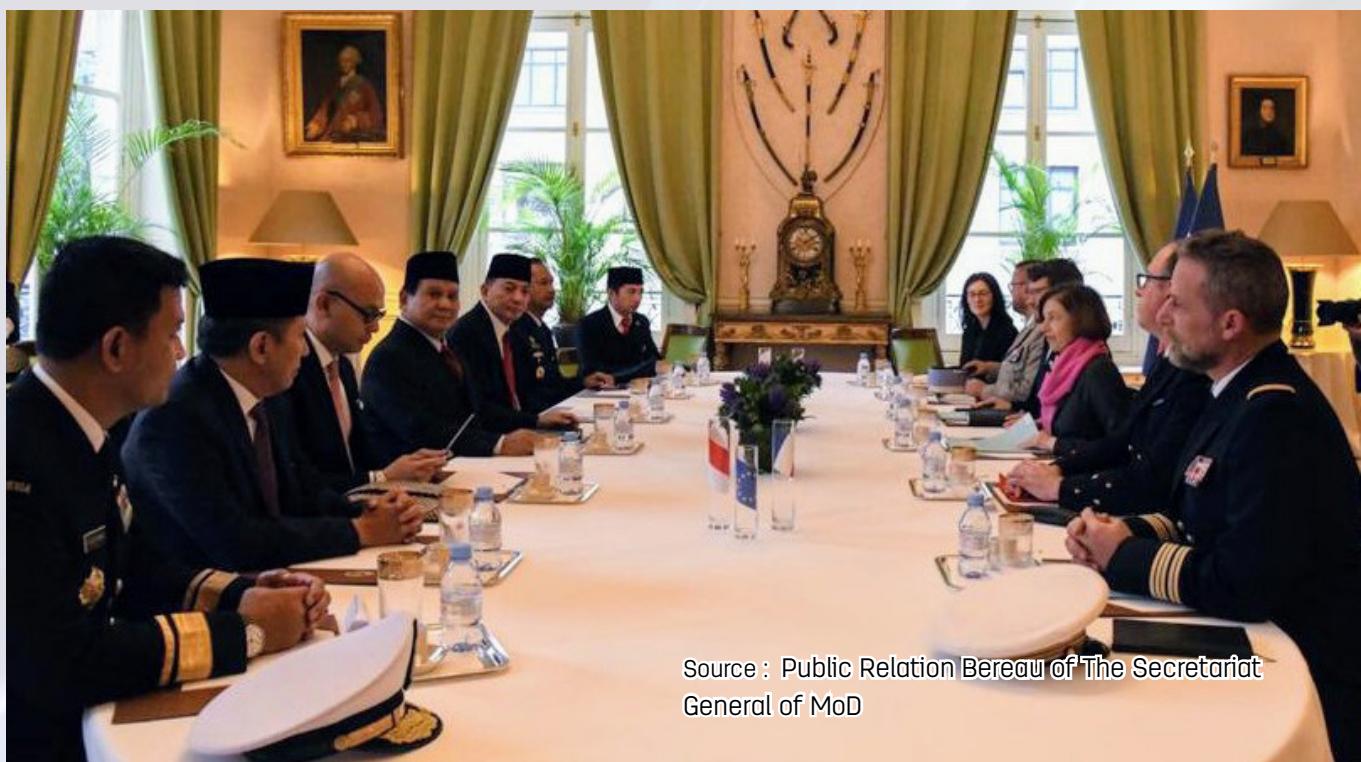
- a) Ambulance particular, both the ambulance offroad on land, at sea and ship ambulance or air ambulance helicopters in the air.
- b) Emergency Hospital (*Rumkitlap* or similar) equipment and equipment which are mobile and practical in use.
- 3) Procurement of Heli and Transport Plane that is versatile so that when natural disasters occur, it can be empowered to jump pioneer forces, send logistical and personnel assistance, evacuate refugees or victims and other assistance activities as needed.
- 4) Oversight of the passage of ships of transport of personnel, hospital ships and Ambulance Sea to support each SRC National PB formed, adequate and in support by capacity, tools equipment and supplies adequate health support.
- 5) Procurement of portable and compatible unit and individual equipment, including:
 - a) Special equipment units and individuals that are adapted to the potential for vulnerability and the threat of natural disasters in the region.
 - b) Procurement of Dapurlap (field kitchen) and the completeness of entertainment and psychology.
 - c) Procurement of communication and electricity equipment.
 - d) Water furifier procurement
 - e) And others as needed.

Closing

Based on numerous studies and opinions of experts in disaster, in the future, Indonesia will face a number of disasters that magnitude is very large and deadly, both natural disasters and disasters that are caused by the actions and negative behavior of Indonesian people themselves. Therefore, it is a necessity for the government as the leading sector in disaster and all relevant parties to sit together to formulate the response to natural disasters holistic and synergistic, including how to put the position, role and duties of the TNI with idle capacity - it appropriately and effectively in helping the government and the community in dealing with natural disasters and reduce the impact of the risks***

Referensi

- Buletin APBN, Vol III, Edisi 18, Hal 7, September 2018
- Buletin APBN, Vol III, Edisi 18, Hal 4, September 2018
- <https://www.republika.co.id/dpd-minta-penanggulangan-bencana-dilakukan-secara-cepat>
- <https://nasional.republika.co.id/berita/sdm-manajemen-bencana-dinilai-masih-minim>
- <http://m.suarasurabaya.net/BNPB-Menilai-Kesadaran-Masyarakat-pada-Potensi-Bencana-Alam-Masih-Rendah>
- <https://www.republika.co.id/dpd-minta-penanggulangan-bencana-dilakukan-secara-cepat>
- <https://kalteng.antaranews.com/korban-tewas-akibat-bencana-hujan-hebat-dijepang>



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

RI Minister of Defense works visit to France, Marks 70 Years of RI-France Diplomatic Relations

The commemoration of 70 years of diplomatic relations between Indonesia and France has been marked by the first high-level visit of Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto to Paris, France.

As a strategic partner, relations between the two countries have proceeded well and opened up great opportunities to enhance defense cooperation. Arriving at the French Ministry of Defense on Monday (1/13), the Indonesian Defense Minister was greeted with a Military Honor Ceremony by French Defense Minister Florence Parly.

During the meeting, the two Defense Ministers discussed efforts to strengthen defense cooperation between the two countries including efforts to strengthen the TNI defense system and advance the national defense industry.

In an effort to strengthen defense cooperation in the defense industry, the

Indonesian Minister of Defense had the opportunity to hold a series of meetings with a number of French industrial companies.

To the French defense industry companies, the Indonesian Minister of Defense hopes that cooperation will be established in accelerating the progress of the defense industry in Indonesia as well as strengthening the TNI defense equipment system through technology transfer, increasing the use of local content and also increasing human resource capacity.

The Indonesian Defense Minister also hopes that the two countries can collaborate to make Indonesia a part of the key global production of defense equipment products.***



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

The Indonesian Minister of Defense is Drafting Regulations of Legislation on The Derivative of The National Resource Management (PSDN) Law for National Defense

Law on Management of National Resources (PSDN) for National Defense which was ratified in the DPR RI Plenary Meeting, Thursday (9/26/2019), is currently in the discussion stage for drafting Government Regulations (RPP) and President Regulations (Perpres). The Directorate General of Defense Potential (*Ditjen Pothan*) of the Ministry of Defense as the leading sector is currently working on regulations derived from the PSDN Law for the National Defense.

Harmonization Plenary Meeting in the context of Strengthening the RPP on Regulation of the Implementation of Law No. 23 of 2019 concerning PSDN for National Defense which took place in Jakarta, Tuesday (14/1) led directly by the Director General of Defense Potential of the Ministry of Defense Prof. Bondan Tiara Sofyan, M.Sc.

In addition to the Ministry of Defense also present at the Plenary Meeting of National Defense force that is ready to be used for the benefit of the Harmonization of RPP



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

Consolidation on Regulation on the Implementation of Law No. 23 of 2019 on PSDN for National Defense the relevant ministries / institutions.

As stated in Article 4, the PSDN Law for National Defense is prepared early to deal with military threats, non-military threats and hybrid threats.

PSDN is carried out through the efforts of Defending the State, Structuring Supporting Components (Komduk), Forming Reserves Components (Komcad), Strengthening Main Components (Komput) as well as mobilization and demobilization. This is stated in Article 5 of the PSDN Law for National Defense.

While the purpose of PSDN is to transform Human Resources, Natural Resources, Artificial Resources and National Infrastructure into a National Defense force that is ready to be used for the benefit of National Defense.***



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

The Secretary General of The Ministry of Defense Attended the TNI Leaders Meeting in 2020



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

Secretary General of the Ministry of Defense Rear Admiral TNI Dr. Agus Setiadji, S.A.P, M.A Attended the TNI Leaders Meeting in 2020 opened by the Indonesian Armed Forces Commander-in-Chief Air Marshal Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, S.I.P, Wednesday (29/1) at GOR Ahmad Yani Building TNI Headquarters Cilangkap Jakarta.

The theme chosen at the TNI 2020 Leaders Meeting (Rapim) is "Building a Strong, Excellent, Advanced and Independent TNI for the Successful Implementation of Principal Tasks". The theme is very much in line with global phenomena that present unpredictable various forms of real threats.

The speakers who attended this event, namely the Minister of PPN / Bapenas, the Minister of Finance and the Chairperson of BPK RI. While the evaluation of the 2019 Work Program submitted by the TNI Chief of General Staff and Planning Assistance Chief of Staff.

Table Top Exercise/TTF will be carried out In this Leaders Meeting (Rapim) activity as a follow up to the development of the TNI Organization that has been carried out, including the Joint Defense Area Command (Kogabwilhan), the TNI Special Operations Command (Koopsus), the TNI Maritime Information Center. This is to provide clarity related to the grand design, mechanism so that there is no overlapping of authority, while waiting for the

completeness of facilities and infrastructure as well as the new defense system.

With the formation of the new organization and various organizational developments in each dimension that are part of the development of the TNI Posture, it becomes a challenge for the TNI to be more able to implement its role as a major component of national defense, followed by the construction of the Integrated TNI Unit (STT) in Saumlaki, Morotai, Biak and Merauke.

Various new organizations that have been formed are an effort of the TNI to be more effective and streamlined the title of TNI operations throughout the Republic of Indonesia and increase the participation of the TNI in combating terrorism.***

Leaders Meeting of Ministry of Defense 2020: Creating Professional Human Resources Who Have the State Defense Spirit



Source: Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

Ministry of Defense, Wednesday (2/5), held a meeting of the Ministry of Defense Unit Organization (UO) Leaders Meeting in 2020 led by the Secretary General of the Ministry of Defense (Secretary General of the Ministry of Defense) Rear Admiral Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A. in the Hall of AH Nasution Building 16 fl Kemhan Office, Jakarta.

The theme raised in the UO Leaders Meeting of the Ministry of Defense of the 2020 Fiscal Year, is "Creating Professional Human Resources who have State Defense Spirit, To Support Strong Universe Defense".

Secretary General of the Ministry of Defense Rear Admiral Dr Agus Setiadji, SAP, MA, opened the Ministry of Defense Unit Organization (UO) Leaders Meeting in 2020 followed by an evaluation of the 2019 Ministry of Defense UO Program and Budget and delivery of the 2020 Leadership Policy. Inspector General of the Ministry of Defense Lieutenant General Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M, when he became the speaker in the Ministry of Defense's Forum to give attention to the performance of each UO in the Ministry of Defense in 2019.

While the Head of the Financial Planning Bureau of the Secretariat of the Ministry of Defense Brigadier General Amad Sugiyono, S.E., M.M. gave a

presentation on the UO of the Ministry of Defense Work Program and the 2020 Budget.

The 2020 UO of the Ministry of Defense Leaders Meeting aims to build synergy of Defense Human Resources that are professional and have a work culture without corruption in order to support the duties of the UO of the Ministry of Defense.

The Forum was attended by all Echelon I, II and III of MoD officials as well as invitations from the TNI Headquarters and the Army Headquarters. In this forum, a symbolic handover of the Echelon I, II, III and IV of the MoD Performance Agreements was carried out.

Also present as a speaker was the Director of Accounting and Financial Reporting of the Directorate General of Treasury of the Indonesian Ministry of Finance, R. Wiwin Instanti, S.E., Ak.M.Laws who explained the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 17 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation, Assessment and Review of Internal Control over Financial Reporting, as well as the Deputy Secretary for Bureaucratic Reform, Accountability Apparatus and Oversight Didid Noordiatmoko, Ak., M.M., Who gave a presentation on the Government Institution Performance Accountability System.***



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

Deputy Minister of Defense Attended DefExpo 2020 in India

Deputy Minister of Defense (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono attended one of the largest defense industry exhibitions in the world, DefExpo 2020 in Lucknow, India on Wednesday (5/2).

The Deputy Minister of Defense attended the exhibition which had been held eleven times by the Indian Ministry of Defense together with the Director General of Defense Planning of the Ministry of Defense Air Vice Marshal Dody Trisunu, Head of the Defense Ministry's Defense Facilities Agency Major General Budi Prijono, Director of Defense Industry Technology Directorate General of Defense Potential of the Ministry of Defense Commodore Sriyanto, and a number of special assistants from the Deputy Minister of Defense.

Deputy Minister of Trenggono joined with other 35 defense ministers from various countries or at the same level when Indian Prime Minister Narendra Modi opened the exhibition which was participated by about a thousand companies, 165 of which were from outside India.

"It's very strategic to take part in activities like DefExpo 2020. First, we can see the latest developments in the

global defense industry. Second, conduct defense diplomacy with a number of potential countries for cooperation. Third, promoting the local defense industry to the global market," said Deputy Minister of Trenggono on the sideline of the visit.

On that occasion the Deputy Minister also claimed to get a lot of knowledge about how India realizing its ambition to become one of the international defense manufacturing centers by inviting world defense companies to invest in the country.

"Lucknow is the capital of Uttar Pradesh which is the largest Indian state in terms of population and has succeeded in becoming a defense industrial area. The key must be certainty of orders from the Ministry of Defense and other Ministries / Government Agencies, to make the national defense industry independent to the global level," he concluded.***



Source : Public Relation Bureau of The Secretariat General of MoD

